



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 83/PMK.02/2022**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 2**

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

**Pasal 3**

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 494

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001 <sup>SM</sup>

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 83/PMK.02/2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	KEMENTERIAN PENANCIAN DAN PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Kepala Pengantar Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.000.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.400.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.650.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.500.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OB	Rp3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp15 miliar s.d. Rp30 miliar	OB	Rp3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp30 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.640.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.260.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.810.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000
	1.3 Pejabat Penguji Tagihan dan Menandatangani Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.500.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.890.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.330.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.690.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1/1	1/2	1/3	1/4
1.4	Bendahara Pengeluaran:		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp310.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp430.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp590.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp870.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.270.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.480.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.430.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp4.760.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp6.260.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp7.760.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp11.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp15.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp19.870.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp24.260.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp28.860.000
1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Berbagai Pegawai:		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp240.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp420.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp580.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp830.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.170.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.140.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp2.980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp4.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp5.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp7.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp10.810.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp14.690.000
	u. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp19.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp23.860.000
2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGEJALA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG MELAKUKAN MENGELOLA BELAKAJA PEGAWAI		
2.1	Atas/ di Atas/Tinggi/Pemegang Kas/Kupon/Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp650.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp910.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp1.240.000
2.2	Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp440.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp870.000
2.3	Juru Baku/ Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	Rp290.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp390.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp540.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp740.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp1.070.000
3	HONORARIUM PENGADAKAN BARANG/JASA		
3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp600.000
3.2	Honorarium kelompok Kerja Pelaksanaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Klasifikasi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp600.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp800.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.570.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.920.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.330.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.800.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp3.330.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.920.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp5.570.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp7.500.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp9.900.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp12.900.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp16.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
11	12	13	14
3.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruktif)		
a	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp700.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp20 miliar	OP	Rp1.910.000
h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
i	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
j	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
k	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
l	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
m	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
n	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
u	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.4	Honorarium kelompok kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruktif)		
a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	UP	Rp450.000
c	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	UP	Rp480.000
e	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000
f	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000
g	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp1,5 miliar	UP	Rp730.000
h	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1,5 miliar s.d. Rp2 miliar	OP	Rp1.090.000
i	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2 miliar s.d. Rp3 miliar	UP	Rp1.270.000
j	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.510.000
k	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.750.000
l	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.990.000
m	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.230.000
n	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.470.000
o	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.710.000
p	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	UP	Rp2.950.000
q	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
r	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.120.000
s	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.360.000
t	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.600.000
3.5	Honorarium Pengguna Anggaran		
3.5.1	Pengadaan Barang/Jasa (Nonstruktif)		
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.280.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.190.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.060.000
3.5.2	Pengadaan Barang (Konstruktif)		
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp1.210.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp1.640.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp1.040.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp1.450.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
3.5.3	Pengadaan Jasa (Nonkonstruktif)		
a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
c	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000

RUB	URAIAN	SATUAN	BEBARAN
11	12	13	14
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp1.500.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.380.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.300.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
4	<b>MINISTRASI PEMANGKALAT UNIT KERJA PENGADAPAN MENDIRI DAN JASO (UKPBJ)</b>		
4.1	Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000
4.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp750.000
5	<b>MINISTRASIUM PENGELOLA PEMERINTAHAN NEGARA MELAKUKAN (PNBP)</b>		
5.1	<b>Pegawai yang Bertugas Melaksanakan Pelaksanaan Pemerintah Negara atau Asas-asas Lainnya Berdasarkan</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	III	Rp420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	III	Rp510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	III	Rp610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	III	Rp700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	III	Rp850.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	III	Rp1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	III	Rp1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	III	Rp1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	III	Rp1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	III	Rp2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	III	Rp2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	III	Rp2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	III	Rp3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	III	Rp3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	III	Rp3.880.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	III	Rp4.220.000
5.2	<b>Berdasarkan Penerimaan</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp650.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp730.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp810.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp890.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp970.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.050.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.210.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp1.370.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp1.450.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp1.530.000
5.3	<b>Ketugas Penerimaan PNBP atau Anggota</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp160.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp260.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp310.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp360.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp410.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp460.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp510.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp560.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp610.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp660.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp710.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp760.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp860.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp910.000
5	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SA)</b>		
5.1	<b>Unit Akuntansi Penerimaan Anggota/Barang, UAP4/UAP3H</b>		
	a. Pengarah	OB	Rp700.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp600.000
	c. Koordinator	OB	Rp500.000
	d. Ketua/Manajer Utama	OB	Rp400.000
	e. Anggota/bebas	OB	Rp350.000



K01	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
6.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Ekeron I (UAPPA-10/10APPA-KI)		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
	b. Koordinator	OB	Rp400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
6.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/10APPA-W), UAPPA-W/10APPA-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/10APPA-W Tugas Pembantuan		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6.4	Unit Akuntansi Kinerja Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/SAKPA, UAKPA/SAKPA Pelaksanaan, UAKPA/SAKPA Tugas Pembantuan)		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
	b. Koordinator	OB	Rp250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
	d. Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
7	HONORARIUM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
7.1	Tingkat Pengguna Barang	OR	Rp400.000
7.2	Tingkat Rusa Pengguna Barang	OB	Rp300.000
8	HONORARIUM KELUHAN JAM PEKERJAAN		
8.1	Pekerjaan Umum	UL	Rp60.000
8.2	Pekerjaan Madya	UL	Rp50.000
8.3	Pekerjaan Muda	UL	Rp40.000
8.4	Pekerjaan Pertama	UL	Rp35.000
9	HONORARIUM PENJAJANG PENELITIAN/ PEKERJAAN		
9.1	Pembantu Peneliti/ Pekerja	OB	Rp25.000
9.2	Koordinator Peneliti/ Pekerja	OB	Rp40.000
9.3	Sekretariat Peneliti/ Pekerja	OB	Rp300.000
9.4	Pengolah Data	Pendukung/ Pekerja	Rp1.500.000
9.5	Petugas Survei	OB	Rp8.000
9.6	Pembantu Lapangan	OB	Rp60.000
10	HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ ATAU MELAKUKAN PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ ATAU MELAKUKAN KEBERHASILAN PENELITIAN		
10.1	Honorarium Komite Penilaian dan/ atau Komite Proposal	Orang Per Proposal	Rp150.000
10.2	Honorarium Komite Berhasil dan/ atau Komite Keberhasilan Penelitian	Per Laporan Per Laporan	Rp10.000 Rp1.000.000
11	HONORARIUM KHASUMBER/ MODERATOR/ PEMBINA/ PANITIA		
11.1	Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Or.	Rp1.700.000
	b. Pejabat Ekeron I/ yang disetarakan	Or.	Rp1.400.000
	c. Pejabat Ekeron II/ yang disetarakan	Or.	Rp1.000.000
	d. Pejabat Ekeron III ke bawah/ yang disetarakan	Or.	Rp900.000
11.2	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
11.3	Honorarium Pembina/ Guru	OR	Rp100.000
11.4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OR	Rp450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OR	Rp400.000
	c. Sekretaris	OR	Rp300.000
	d. Anggota	OR	Rp200.000
12	HONORARIUM PENYAKSI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
12.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	Orang/Kali	Rp1.500.000
12.2	Honorarium Penyaksi	Orang/Kali	Rp1.500.000

NO.	DESKRIPSI	SATUAN	BESARAN
15.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI		
15.1	HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TERTENTU		
15.1.1	Universitas/Instansi		
a.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV/Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLJIKTH)	OR	Rp3.150.000
b.	Pimpinan Fakultas/Pascasarjana		
1)	Direktur Pascasarjana	OD	Rp3.150.000
2)	Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OR	Rp1.975.000
3)	Ketua Program Studi Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
4)	Sekretaris Program	OR	Rp1.250.000
c.	Lembaga/Badan		
1)	Ketua/Kepala/Direktur	OR	Rp2.500.000
2)	Sekretaris/Wakil Direktur	OR	Rp1.500.000
d.	Pusat		
1)	Kepala	OB	Rp1.480.000
2)	Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp1.000.000
e.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp1.975.000
2)	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Madhad		
1)	Dekan/Pimpinan	OB	Rp1.475.000
2)	Sekretaris/Wakil	OD	Rp1.200.000
3)	Pengasah/Muwasib	OR	Rp900.000
4)	Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
g.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp3.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp2.500.000
h.	Program Studi		
1)	Ketua/Koordinator	OB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
i.	Satuan Pegawai Internal (SPI)		
1)	Ketua	OB	Rp1.500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
j.	Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen		
1)	Ketua	OB	Rp750.000
2)	Sekretaris/Ketua Dima'	OB	Rp500.000
k.	Laboratorium/Bagian/Stasiun/Bengkel		
Kepala/Koordinator	OB	Rp1.250.000	
l.	Rehat		
1)	Ketua	OB	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp800.000
3)	Ketua Komisi	OD	Rp600.000
m.	Sesuai Fakultas		
1)	Ketua	OB	Rp500.000
2)	Sekretaris	OB	Rp300.000
n.	Kopertais		
1)	Koordinator	OB	Rp600.000
2)	Wakil/Sekretaris	OB	Rp500.000
15.1.2	Politikain		
a.	Penibantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerja Sama)	OR	Rp1.800.000
b.	Piket		
Kepala	OR	Rp1.300.000	
c.	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
1)	Ketua	OB	Rp1.200.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.000.000
d.	Jurusan		
1)	Ketua	OB	Rp1.700.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
e.	Program Studi		
1)	Ketua	OR	Rp1.400.000
2)	Sekretaris	OB	Rp1.200.000
f.	Satuan Pegawai Internal (SPI)		
1)	Ketua	OR	Rp1.200.000
2)	Sekretaris	OB	Rp900.000
g.	Kepala Laboratorium	OR	Rp1.200.000
h.	Sesuai		
1)	Ketua	OR	Rp1.000.000
2)	Sekretaris	OB	Rp600.000
3)	Ketua Komisi	OB	Rp500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	DESARAN
13.1.3	Sekolah Tinggi		
	a. Pimpinan Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
	1) Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
	2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.750.000
	3) Sekretaris Program	OB	Rp750.000
	4) Ketua Konsentrasi	OB	Rp750.000
	b. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	c. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	1) Ketua	OB	Rp1.200.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	d. MaJrad		
	1) Direktur/Pimpinan	OB	Rp550.000
	2) Sekretaris/Wakil	OB	Rp500.000
	3) Pengasuh/Muwajah	OB	Rp100.000
	4) Koordinator Bidang	OB	Rp400.000
	e. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp1.000.000
	f. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp1.400.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	g. Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	1) Ketua	OB	Rp1.300.000
	2) Sekretaris	OB	Rp550.000
	h. Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
	i. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp600.000
	3) Ketua Kumisi	OB	Rp100.000
13.1.4	Akademi		
	a. Pusat		
	1) Kepala	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang	OB	Rp750.000
	b. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
	Ketua	OB	Rp550.000
	c. Jurusan		
	1) Ketua	OB	Rp1.000.000
	2) Sekretaris	OB	Rp750.000
	d. Program Studi		
	1) Ketua	OB	Rp750.000
	2) Koordinator Dosen	OB	Rp500.000
	e. Senat		
	1) Ketua	OB	Rp500.000
	2) Sekretaris	OB	Rp400.000
	3) Anggota	OB	Rp350.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
13.2	<p><b>HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGLATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN</b></p> <p><b>a. Program Diploma, Sarjana, dan Profesi</b></p> <p>1) Ujian Masuk</p> <p>a) Pengisi Al Qur'an/Lisan b) Sidang Penentuan Kelulusan</p> <p>2) Kelebihan Jam Mengajar</p> <p>a) Kelas Reguler</p> <p>(1) Guru Besar (2) Lektor Kepala (3) Lektor (4) Asisten Ahli</p> <p>b) Kelas Nonreguler</p> <p>(1) Guru Besar (2) Lektor Kepala (3) Lektor (4) Asisten Ahli</p> <p>c) Kelas Internasional</p> <p>(1) Guru Besar (2) Lektor Kepala (3) Lektor (4) Asisten Ahli</p> <p>3) Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir</p> <p>4) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir</p> <p>5) Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakabah</p> <p>6) Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)</p> <p>7) Penguji Komprehensif</p> <p>8) Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakabah</p> <p>9) Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakabah</p> <p>10) Dosen Wali/Banahat/Pembimbing Akademik</p> <p>11) Honorarium Penguji Hasil Praktek Lapangan dan Ujian Kompetensi FKIK</p> <p>a) Penguji Hasil Praktek Lapangan</p> <p>b) Uji Kompetensi (Computer Based Test (C.B.T), Objective Structured Clinical (OSCC), Blok, dan sejenisnya)</p> <p>(1) Koordinator (2) Koordinator Lokasi (3) Penguji (4) Peserta Simulasi (5) Pelatih Pasien Simulasi</p> <p>12) Profesi (Klinik, Akademik (Preklinis), Keterampilan Klinik Dasar (KKD), dan Pelaksanaan Modul Khusus</p> <p>a) Koordinator Klinik (Profesi)</p> <p>b) Akademik (Preklinis)</p> <p>(1) Koordinator Preklinik (Akademik) (2) Asisten Koordinator Preklinik</p> <p>c) Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD) d) Koordinator Pelaksanaan Modul khusus</p> <p>13) Kelebihan Jam Fasilitas/Tutor/Pembimbing Praktikum</p> <p>14) Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran (FK/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Dig. (FKD)/Praktik Profesi</p> <p><b>b. Program Pascasarjana</b></p> <p>1. Validasi Naskah Soal Ujian Masuk</p> <p>a) Validasi Naskah Soal S2/Sp1 b) Validasi Naskah Soal S3/Sp2</p> <p>2. Telaah Hasil Ujian Masuk</p> <p>a) Telaah Hasil Ujian S2/Sp1 b) Telaah Hasil Ujian S3/Sp2</p> <p>3. Penguji Lisan Ujian Masuk</p> <p>a) Penguji Lisan S2/Sp1 b) Penguji Lisan S3/Sp2</p> <p>4) Kelebihan Jam Mengajar</p> <p>a) Kelas Reguler-S2/Sp1</p> <p>(1) Guru Besar (2) Lektor Kepala (3) Lektor</p>	<p>Per Peserta OK</p> <p>SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir</p> <p>SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir</p> <p>Orang/Mahasiswa Orang/Mahasiswa Per Mahasiswa Per Mata Kuliah</p> <p>Per Mahasiswa Per Mahasiswa Orang/Mahasiswa Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa</p> <p>OK OK OK OK OK</p> <p>Orang/Kelas OH OH OH</p> <p>Orang/Semester Jam/Hari</p> <p>Orang/Mahasiswa</p> <p>Per Naskah Per Naskah</p> <p>Per Peserta Per Peserta</p> <p>Per Peserta Per Peserta</p> <p>SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir</p>	<p>Rp35.000 Rp300.000</p> <p>Rp300.000 Rp250.000 Rp200.000 Rp150.000</p> <p>Rp300.000 Rp250.000 Rp200.000 Rp150.000</p> <p>Rp350.000 Rp300.000 Rp250.000 Rp200.000</p> <p>Rp50.000 Rp750.000 Rp100.000 Rp1.000.000</p> <p>Rp100.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp40.000</p> <p>Rp250.000</p> <p>Rp1.000.000 Rp750.000 Rp500.000 Rp200.000 Rp300.000</p> <p>Rp500.000 Rp75.000 Rp30.000 Rp50.000 Rp750.000 Rp75.000</p> <p>Rp100.000 Rp150.000</p> <p>Rp50.000 Rp75.000</p> <p>Rp50.000 Rp100.000</p> <p>Rp350.000 Rp300.000 Rp250.000</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	1a) Kelas Reguler S3/Sp2		
	11) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	12) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	13) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	14) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	c) Kelas Internasional-S3/Sp1		
	11) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
	12) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	13) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	14) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	d) Kelas Internasional-S3/Sp2		
	11) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	12) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	13) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	14) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	2) Ujian Semester Pascasarjana		
	a) Telaah dan Feedback Hasil Ujian S2/Sp1	Per Mahasiswa	Rp250.000
	b) Telaah dan Penulisan Hasil Ujian S2/Sp2	Per Mahasiswa	Rp300.000
	3) Mata Kuliah Pemrograman Disertasi (MKPD)/Tutorial	Orang/Mahasiswa/ Semester	Rp600.000
	7) Ujian/Seminar Proposal Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	8) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mahasiswa	Rp100.000
	9) Ujian Kualifikasi/Komprehensif		
	a) Ketua	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	b) Sekretaris	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	c) Pengaji (Tulis/Lisan/Korektor)	Orang/Mahasiswa	Rp250.000
	10) Ujian/Seminar Proposal Disertasi		
	a) Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	b) Prangko Utama	Orang/Mahasiswa	Rp200.000
	11) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp450.000
	12) Pembimbing Tesis		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.250.000
	13) Pembimbing Disertasi		
	a) Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp4.500.000
	b) Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp3.600.000
	14) Verifikasi Naskah Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp500.000
	15) Dewan Perimbangan Akademik		
	a) Pengarah/Penanggung jawab	Orang/Semester	Rp400.000
	b) Ketua	Orang/Semester	Rp350.000
	c) Sekretaris/Anggota	Orang/Semester	Rp300.000
	16) Penasehat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2	Per Mahasiswa/ Semester	Rp50.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.3	LAIN-LAIN		
	a. Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp175.000
	b. Honorarium Mengajar S2/Sp1		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
	c. Honorarium Mengajar S3/Sp2		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
	d. Honorarium Mengajar Kelas Internasional		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp150.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
	e. Honorarium Mengajar Semester Pendek/ Semester Afilii Tahun		
	1) Guru Besar	SKS/Hadir	Rp200.000
	2) Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp150.000
	3) Lektor	SKS/Hadir	Rp100.000
	4) Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp80.000
	f. Honorarium Mengajar Dosen Tamu		
	a) Nasional	Or.	Rp500.000
	b) Internasional	Or.	Rp850.000
	g. Honorarium Pembimbing/Pembina Teahnik	Orang/Mahasiswa/ Bulan	Rp50.000
	h. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengabdian Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya		
	1) Pembimbing	OK	Rp600.000
	2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktek		
	a) Penanggung Jawab	OK	Rp700.000
	b) Koordinator	OK	Rp650.000
	c) Pembimbing/Guru Pamong	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	3) Pendamping Desa/Kecamatan	OK	Rp650.000
	i. Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktek Lapangan/ On Job Training / Kuliah Kerja Nyata (KKN) Praktek/Prakerin		
	1) Koordinator Praktek Lapangan/ On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Praktek/Prakerin	Or.	Rp750.000
	2) Pembimbing Hasil Praktek Lapangan/ On Job Training / KKN Praktek	Judul	Rp350.000
	3) Uji Kompetensi		
	a) Pembina Uji Kompetensi	Or.	Rp1.000.000
	b) Pembantu Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
	j. Pembimbing Mengajar Fakultas Kedokteran (FK)/ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Praktek Profesi Dan Luar	Orang/Mahasiswa	Rp375.000
	k. Asisten/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Berupa Kerja Dosen (BKD); Dan Luar	Jam/Hadir	Rp75.000
	l. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)		
	1) Pembina UKM	Or.	Rp300.000
	2) Pelatih UKM	Or.	Rp200.000
	m. Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional	Per Judul	Rp1.000.000
	n. Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	Rp50.000
	o. Honorarium Sadang Sener	OK	Rp250.000
	p. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar		
	1) Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah	Per mata kuliah	Rp3.500.000
	2) Honorarium Penyusunan Bahan Ajar :		
	a) Program Diploma dan S1		
	1) Bahasa Indonesia	Per modu.	Rp5.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp6.000.000
	b) Program Pascasarjana		
	(1) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp7.000.000
	(2) Berbahasa Asing	Per modul	Rp6.500.000
	3) Honorarium Penelaahan Bahan Ajar		
	a) Berbahasa Indonesia	Per modul	Rp1.000.000
	b) Berbahasa Asing	Per modul	Rp1.500.000
	g. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial		
	1) Honorarium Penyusunan Gans Besar Program Media (GBPM) Tutorial	Per program	Rp500.000
	2) Honorarium Penulisan Naskah Tutorial Melekan Media	Per naskah	Rp1.100.000
	3) Honorarium Pengembangan Kit Tutorial	Per mata kuliah	Rp3.200.000
	4) Honorarium Tutor		
	a) Tutor Program S1	Per pertemuan	Rp300.000
	b) Tutor Program S2	Per pertemuan	Rp500.000
	c) Tutor Program di Luar Negeri	Per pertemuan	Rp800.000
	5. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian		
	1) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian		
	a) Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi Soal	Per mata kuliah	Rp1.000.000
	b) Honorarium Penyusunan Soal Ujian Bank Soal		
	(1) Soal Objektif	Per butir soal	Rp25.000
	(2) Soal Uraian (Beserta Pedoman Scoring)	Per butir soal	Rp150.000
	c) Honorarium Penyusunan Soal Ujian Komprehensif (Beserta Pedoman Scoring) Tugas Akhir Program	Per butir soal	Rp250.000
	2) Honorarium Pengawas Ujian Luar Negeri	Per hari	Rp700.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
14	15	16	17
14	HONORARIUM PENYULUH KONGRES/KONGRES SIMIL		
14.1	SLTA	05	Rp2.120.000
14.2	Sesjensi Muda	05	Rp2.400.000
14.3	Sesjensi	05	Rp2.600.000
14.4	Musisi (Sc)	05	Rp2.000.000
15	SALINAN BIAYA OPERASIONAL HONORARIUM		
15.1	Wajah Barat	06	Rp300.000
15.2	Wajah Tengah	06	Rp400.000
15.3	Wajah Timur	06	Rp400.000
16	HONORARIUM KONGRES/WORKSHOP	06	Rp400.000
17	HONORARIUM DAN PELAKSANA KEGIATAN LAIN SEKRETARIAT TTA MELAKUKAKAN KEGIATAN		
17.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
17.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Yayasan		
a.	Pengarah	08	Rp1.500.000
b.	Pemanggang Jawab	08	Rp1.250.000
c.	Koordinator/Ketua	08	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	08	Rp1.750.000
e.	Sekretaris	08	Rp1.500.000
f.	Anggota	08	Rp1.500.000
17.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pangreh Setingkat Menteri		
a.	Pengarah	08	Rp1.500.000
b.	Pemanggang Jawab	08	Rp1.250.000
c.	Ketua	08	Rp1.500.000
d.	Wakil Ketua	08	Rp1.250.000
e.	Sekretaris	08	Rp1.250.000
f.	Anggota	08	Rp1.250.000
17.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a.	Pengarah	08	Rp1.250.000
b.	Pemanggang Jawab	08	Rp1.000.000
c.	Ketua	08	Rp650.000
d.	Wakil Ketua	08	Rp650.000
e.	Sekretaris	08	Rp650.000
f.	Anggota	08	Rp650.000
17.1.4	Yang Ditetapkan Oleh Kepala		
a.	Pengarah	08	Rp1.000.000
b.	Pemanggang Jawab	08	Rp1.000.000
c.	Ketua	08	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	08	Rp1.000.000
e.	Sekretaris	08	Rp1.000.000
f.	Anggota	08	Rp1.000.000
17.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
17.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Menteri		
a.	Ketua/Wakil Ketua	08	Rp500.000
b.	Anggota	08	Rp100.000
17.2.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri		
a.	Ketua/Wakil Ketua	08	Rp150.000
b.	Anggota	08	Rp120.000
18	HONORARIUM DAN PENYULUHAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PEKERJAAN BERTULIS		
18.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Pemanggang Jawab	08	Rp100.000
b.	Koordinator	08	Rp100.000
c.	Penyunting/Editor	08	Rp100.000
d.	Desain Grafis	08	Rp100.000
e.	Penyagral	08	Rp100.000
f.	Sekretaris	08	Rp100.000
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
18.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/MAJALAH		
a.	Pemanggang Jawab	08	Rp100.000
b.	Koordinator	08	Rp100.000
c.	Penyunting/Editor	08	Rp100.000
d.	Desain Grafis	08	Rp100.000
e.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
18.3	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/MAJALAH		
a.	Pemanggang Jawab	08	Rp100.000
b.	Koordinator	08	Rp100.000
c.	Penyunting/Editor	08	Rp100.000
d.	Desain Grafis	08	Rp100.000
e.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000
19	HONORARIUM PENYKUTINGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SESWALY DAN/ATAU MEETING BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL, MONITORING/REVIEW/STANDISAS/SARASAJIAN BERSISWA INTERNASIONAL		
19.1	Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral)		
a.	Pengarah	08	Rp2.000.000
b.	Pemanggang Jawab	08	Rp2.000.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	08	Rp2.000.000
d.	Koordinator/Delegasi	08	Rp2.000.000
e.	Tim Asistensi	08	Rp2.000.000
f.	Anggota Delegasi/Kelembagaan/Delegasi	08	Rp2.000.000
g.	Koordinator	08	Rp2.000.000



K/C	LIMBAR	SATUAN	BIAYA
K/C	L	S	B
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Bidang</li> <li>1. Sekretaris</li> <li>1. Anggasa Pembina</li> <li>4. Dosen (Office Hold)</li> <li>1 Staf Pratikologi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 100.000</li> <li>Rp. 600.000</li> <li>Rp. 400.000</li> <li>Rp. 400.000</li> <li>Rp. 200.000</li> </ul>
19.2	<b>Memorandum Penyelenggaraan Walikota Semarang (Sesi) dan Sarawahan, Helsinki Internasional</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengant</li> <li>b. Penanggung Jawab</li> <li>c. Ketua/Wakil Ketua</li> <li>d. Ketua Delegasi</li> <li>e. Tim Asisten: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Keluarga Republik Indonesia</li> <li>2. Realistis</li> <li>3. Ketua Bidang</li> <li>4. Sekretaris</li> <li>5. Anggasa Panitia</li> <li>6. Dosen Office Hold</li> <li>7. Staf Pratikologi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 100.000</li> <li>Rp. 000.000</li> <li>Rp 000.000</li> <li>Rp 000.000</li> <li>Rp 000.000</li> <li>Rp 000.000</li> <li>Rp 000.000</li> <li>Rp 000.000</li> <li>Rp 500.000</li> <li>Rp 500.000</li> <li>Rp 500.000</li> <li>Rp 400.000</li> </ul>
20	<b>MOPROKURUM PENYELERANGA ALIEN DAN WAKAS</b>		
20.1	<b>Tingkat Pendidikan Dasar</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian</li> <li>b. Pengawas Ujian</li> <li>c. Pemeriksa Hasil Ujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kakab/Pelajaran OH</li> <li>Spesial Mata Ujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 150.000</li> <li>Rp 200.000</li> <li>Rp 5.000</li> </ul>
20.2	<b>Tingkat Pendidikan Menengah</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian</li> <li>b. Pengawas Ujian</li> <li>c. Pemeriksa Hasil Ujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kakab/Pelajaran OH</li> <li>Spesial Mata Ujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 100.000</li> <li>Rp 270.000</li> <li>Rp 7.500</li> </ul>
20.3	<b>Tingkat Pendidikan Tinggi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Depdikbud, Dikti, Ditjen Ditk.Pg <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian</li> <li>2) Pengawas Ujian</li> <li>3) Pemeriksa Hasil Ujian</li> <li>4) Pengawas Ujian Negara Pengawasan Tinggi Negara</li> <li>5) Panitia Ujian Ketertarikan pada Ujian Masuk Pengawasan Tinggi Negara</li> </ul> </li> <li>b. Skema 2 TK <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian</li> <li>2) Pengawas Ujian</li> <li>3) Pemeriksa Hasil Ujian</li> <li>4) Pengawasan Mata Ujian</li> <li>5) Pengawasan</li> </ul> </li> <li>c. Skema 3 SK <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan/Pembuat Bahan Ujian</li> <li>2) Pengawas Ujian</li> <li>3) Pemeriksa Hasil Ujian</li> <li>4) Pengawasan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kakab/Pelajaran OH</li> <li>Mahasiswa/Mart Ujian Orang Mula Ujian Per Peserta</li> <li>Kakab/Pelajaran OH</li> <li>Mahasiswa/Mata Ujian Ulang Mahasiswa</li> <li>Kakab/Pelajaran OH</li> <li>Mahasiswa/Mart Ujian Orang Mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 250.000</li> <li>Rp 290.000</li> <li>Rp 10.000</li> <li>Rp 200.000</li> <li>Rp 75.000</li> <li>Rp 350.000</li> <li>Rp 200.000</li> <li>Rp 15.000</li> <li>Rp 150.000</li> <li>Rp 200.000</li> <li>Rp 200.000</li> <li>Rp 200.000</li> <li>Rp 200.000</li> </ul>
21.	<b>MEMORANDUM PENGLISAN BUKU DAN GURUKAT BAKUSAL</b>		
21.1	<b>Memorandum Pengawasan dan Soal Tingkat Nasional</b>	Per Baku Soal	R. 120.000
21.2	<b>Memorandum Teknik Buku dan Tingkat Nasional</b>	Per Baku Soal	Rp 60.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Teknik Materi Soal</li> <li>b. Teknik Bahasa Soal</li> </ul>	Per Baku Soal	Rp 60.000
22.	<b>MEMORANDUM PENYELERANGAAN NEGASIAK PENYILOKAN DAN PELATIHAN (DILAT)</b>		
22.1	<b>Memorandum Pengantar</b>	O.P	Rp 1.000.000
22.2	<b>Memorandum Pengantar yang berisi dan lain lain dan tera penyelenggara</b>	O.P	Rp 100.000
22.3	<b>Memorandum Pengantar yang berisi dan lain lain dan tera penyelenggara</b>	O.P	Rp 200.000
22.4	<b>Memorandum Pengantar Mudi Dikti</b>	Per Mada	Rp 5.000.000
22.5	<b>Memorandum Panitia Penyelenggara Kegiatan Dikti</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lima Dikti s.d. 10 hari <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penanggung Jawab</li> <li>2) Ketua/Wakil Ketua</li> <li>3) Sekretaris</li> <li>4) Anggota</li> </ul> </li> <li>b. Lima Dikti s.d. 10 hari <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penanggung Jawab</li> <li>2) Ketua/Wakil Ketua</li> <li>3) Sekretaris</li> <li>4) Anggota</li> </ul> </li> <li>c. Lima Dikti lebih dari 10 hari <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penanggung Jawab</li> <li>2) Ketua/Wakil ketua</li> <li>3) Sekretaris</li> <li>4) Anggota</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> <li>OK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 300.000</li> <li>Rp 350.000</li> <li>Rp 350.000</li> <li>Rp 100.000</li> <li>Rp 400.000</li> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 450.000</li> <li>Rp 450.000</li> </ul>
23.	<b>SATUAN BIAYA (SANG NALAY BADI) PEGAWAI APARAT SIPN NEGARA DAN UANG LAKU PAKIK BADI ANGGASA POLIBRITA</b>		
23.1	<b>Satuan Biaya Uang Makas Badi Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Golongan I dan II</li> <li>b. Golongan III</li> <li>c. Golongan IV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 35.000</li> <li>Rp 27.000</li> <li>Rp 41.000</li> <li>Rp 30.000</li> </ul>
23.2	<b>Uang Laku Pakik Bagi Anggasa Pribadi</b>	OH	Rp 60.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	01	01	01
24.	SATUAN BIAYA (JANG LEMBUR DAN UANG MASA LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
24.1	Jang Lembur		
a.	Setengah I	UU	Rp13.000
b.	Setengah II	UU	Rp17.000
c.	Setengah III	UU	Rp20.000
d.	Setengah IV	UU	Rp25.000
24.2	Uang Masa Lembur		
a.	Setengah I dan II	QH	Rp15.000
b.	Setengah III	QH	Rp17.000
c.	Setengah IV	QH	Rp21.000
25.	SATUAN BIAYA (JANG LEMBUR DAN UANG MASA LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENLEMBU, PETUGAS NEBRESHAH, DAN PRAKTIKANT)		
25.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
a.	Jang Lembur	UU	Rp10.000
b.	Uang Masa Lembur	Ub	Rp11.000
25.2	Selama Perjalanan, Prinsipal Keberhasilan, dan Pramubawa		
a.	Jang Lembur	UI	Rp13.000
b.	Jang Masa Lembur	UII	Rp15.000
26.	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI		
26.1	Paketan Seungkal Kasian 1 dan 11 yang telah	2B	Rp100.000
26.2	Paketan Seungkal Kasian 11 yang telah berubah	2B	Rp100.000
27.	SATUAN BIAYA PERJALANAN DAN AKOMODASI BAGI PERJALANAN DIRAS PINDA DALAM NEGERI		
27.1	Kendaraan		
a.	Penggunaan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp10.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Sebagai (1) terlampir
27.2	Truk		
a.	Penggunaan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp10.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp100
27.3	Angkutan Laut/Daraga		
a.	Penggunaan dan Penggudangan	m <sup>3</sup>	Rp10.000
b.	Angkutan	km/m <sup>3</sup>	Rp100
c.	Angkutan Laut/Daraga	m <sup>3</sup>	Sebagai (1) terlampir
28.	SATUAN BIAYA BARTAR BIAYA PERDINDINGAN AKADIDIPATI TADI PERWALAY KSIUDAN INDONESIA		
28.1	LABOR KAUERI		
28.1	Sekolah Dasar	Per Tahun	\$ 6.550
28.2	Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	\$ 10.940
28.3	Sekolah Menengah Atas	Per Tahun	\$ 12.560
28.4	Kampus Tinggi	Per Tahun	\$ 14.840

29 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PRYUDAN KEDBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	Rp4.000.000	Rp3.654.000
2.	SUMATRA UTARA	OB	Rp3.247.000	Rp2.952.000
3.	RIAU	OB	Rp3.741.000	Rp3.401.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp3.964.000	Rp3.622.000
5.	JAMBI	OB	Rp3.369.000	Rp3.081.000
6.	SUMATRA BARAT	OB	Rp3.211.000	Rp2.919.000
7.	SUMATRA SELATAN	OB	Rp3.631.000	Rp3.574.000
8.	LAMPUNG	OB	Rp3.039.000	Rp2.763.000
9.	BENGKULU	OB	Rp2.649.000	Rp2.500.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	Rp4.200.000	Rp3.818.000
11.	BANTEN	OB	Rp3.175.000	Rp2.887.000
12.	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OD	Rp5.615.000	Rp5.104.000
14.	JAWA TENGAH	OD	Rp2.280.000	Rp2.070.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	Rp2.425.000	Rp2.205.000
16.	JAWA TIMUR	OB	Rp4.135.000	Rp3.759.000
17.	HALU	OB	Rp3.217.000	Rp2.924.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp2.826.000	Rp2.569.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OD	Rp2.531.000	Rp2.301.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp3.117.000	Rp2.834.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp3.731.000	Rp3.392.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp3.753.000	Rp3.412.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp3.857.000	Rp3.515.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp4.191.000	Rp3.810.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.219.000	Rp3.854.000
26.	GORONTALO	OB	Rp3.654.000	Rp3.321.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.443.000	Rp3.130.000
28.	SULAWESI SELATAN	OD	Rp4.036.000	Rp3.671.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	Rp3.044.000	Rp2.767.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.487.000	Rp3.170.000
31.	MALUKU	OB	Rp3.330.000	Rp3.028.000
32.	MALUKU UTARA	OD	Rp3.627.000	Rp3.297.000
33.	PAPUA	OB	Rp4.604.000	Rp4.165.000
34.	PAPUA BARAT	OB	Rp4.124.000	Rp3.749.000

BK

30 SATUAN UANG HAKAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

30.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DILAKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp360.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp360.000	Rp150.000	Rp110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp360.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BEKULU	OH	Rp360.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	RAJAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp500.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	BALI	OH	Rp490.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp160.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp290.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp350.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	CENTRAL	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp500.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp490.000	Rp190.000	Rp140.000

30.2 Uang Representasi

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT BERSICIL	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT BERSICIL II	OH	Rp150.000	Rp75.000

31 SATUAN BIAYA GANG JIARAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	SATUAN	KOLONAS			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AMERIKA UTARA</b>						
1.	Amerika Serikat	OH	650	363	505	497
2	Kanada	OH	552	467	415	367
<b>AMERIKA SELATAN</b>						
3.	Argentina	OH	534	402	351	319
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolumbia	OH	466	413	393	355
8	Pecu	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	361	298	268
10.	Ekuador	OH	416	355	319	283
<b>AMERIKA TENGAH</b>						
11	Meksiko	OH	553	466	417	366
12.	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
<b>EROPA BARAT</b>						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Danimak	OH	545	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	321
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
<b>EROPA UTARA</b>						
20.	Denmark	OH	569	491	428	375
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346
22.	Norwegia	OH	621	559	469	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24.	Inggris	OH	792	774	583	582
<b>EROPA SELATAN</b>						
25.	Desna dari Herzegovina	OH	436	420	334	333
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405
27.	Spanyol	OH	457	413	356	296
28.	Yunan	OH	427	379	327	289
29.	Italia	OH	702	637	446	427
30.	Portugal	OH	425	382	306	279
31.	Serbia	OH	417	375	328	288
<b>EROPA TIMUR</b>						
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hungaria	OH	485	438	390	346
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	566	512	407	406
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331
<b>AFRIKA BARAT</b>						
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41.	Senegal	OH	461	393	338	311
<b>AFRIKA TIMUR</b>						
42.	Etiopia	OH	420	374	330	285
43.	Kenya	OH	457	410	341	308
44.	Madagaskar	OH	396	365	286	252
45.	Tanzania	OH	458	385	357	303
46.	Zimbabwe	OH	430	403	330	316
47.	Mozambik	OH	472	435	356	314

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>AFRIKA SELATAN</b>						
48.	Namibia	OH	442	376	312	269
49.	Afrika Selatan	OH	499	400	363	317
<b>AFRIKA UTARA</b>						
50.	Aljazair	OII	384	351	310	290
51.	Mesir	OII	481	426	405	361
52.	Maroko	OH	403	353	310	272
53.	Tunisia	OII	379	300	260	237
54.	Sudan	OH	443	408	358	300
55.	Libya	OH	456	393	340	320
<b>ASIA BAKAT</b>						
56.	Azerbaijan	OII	436	475	365	364
57.	Bahrain	OII	475	421	204	217
58.	Irak	OH	461	392	351	310
59.	Yordania	OII	504	428	382	336
60.	Kuwait	OH	581	491	437	388
61.	Libanon	OH	457	384	348	307
62.	Qatar	OH	500	448	349	290
63.	Sunah	OH	355	301	272	243
64.	Turki	OH	450	364	311	276
65.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66.	Yaman	OH	353	248	226	204
67.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68.	Kesultanan Oman	OH	518	437	390	343
<b>ASIA TIMUR</b>						
69.	Republik Rakyat Tiongkok	OII	411	351	315	278
70.	Hongkong	OH	401	507	451	395
71.	Jepang	OH	514	428	382	336
72.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73.	Korea Utara	OII	494	321	300	278
<b>ASIA SELATAN</b>						
74.	Afganistan	OH	385	262	234	214
75.	Bangladesh	OH	338	313	243	238
76.	India	OII	422	329	327	325
77.	Pakistan	OII	343	277	251	225
78.	Sri Lanka	OH	388	332	299	265
79.	Sri Lan	OH	491	332	269	266
<b>ASIA TENGAH</b>						
80.	Uzbekistan	OH	392	362	287	254
81.	Kazakhstan	OH	454	429	334	333
<b>ASIA TENGGARA</b>						
82.	Filipina	OH	412	367	266	226
83.	Singapura	OH	615	519	461	403
84.	Malaysia	OIS	394	304	274	244
85.	Thailand	OH	392	330	297	264
86.	Myanmar	OH	368	259	210	196
87.	Laos	OH	380	277	251	225
88.	Vietnam	OH	363	292	244	219
89.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90.	Kamboja	OH	296	223	201	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
<b>ASIA PASIFIK</b>						
92.	Australia	OII	636	585	424	393
93.	Selandia Baru	OH	515	461	411	361
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	259	266
95.	Papua Nugini	OII	529	475	429	376
96.	Fiji	OH	427	365	327	289

32 SATUAN BIAYA PENJAJARAN PERJALANAN DIRAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III / II / I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.536.000	Rp1.294.000	Rp616.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp663.000
3.	R I A L	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000	Rp4.192.000	Rp1.225.000	Rp560.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp811.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.140.000	Rp560.000
9.	BENGGULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.680.000	Rp718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp3.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	D K I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.053.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.850.000	Rp1.024.000	Rp600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.381.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.149.000	Rp2.007.000	Rp1.675.000	Rp813.000
17.	B A L I	OH	Rp3.478.000	Rp1.946.000	Rp1.348.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.618.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.001.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp607.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.019.000	Rp2.290.000	Rp1.170.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.157.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.075.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.138.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.305.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.648.000	Rp867.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.813.000	Rp1.160.000	Rp600.000
33.	P A P U A	OH	Rp1.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.638.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.141.000	Rp2.056.000	Rp967.000

33 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN D. LUAR KANTOR

33.1 Paket Registeri Rapat/Peremuan di Luar Kantor

a. Menteri dan Setingkat Menteri

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	FULL DAY	FULL BOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.385.000
2.	SUMATRA UTARA	OP	Rp451.000	Rp676.000	Rp1.350.000
3.	RIAU	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.207.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.181.000
5.	JAKART	OP	Rp466.000	Rp595.000	Rp1.230.000
6.	SUMATRA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000
7.	SUMATRA SELATAN	OP	Rp472.000	Rp718.000	Rp1.418.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp536.000	Rp1.262.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp544.000	Rp714.000	Rp1.632.000
11.	BANTEN	OP	Rp512.000	Rp764.000	Rp1.401.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp511.000	Rp799.000	Rp1.314.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp742.000	Rp973.000	Rp2.257.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp374.000	Rp590.000	Rp1.310.000
15.	D.I. YOKYAKARTA	OP	Rp366.000	Rp607.000	Rp1.476.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp438.000	Rp710.000	Rp2.159.000
17.	D.A.I.I	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp600.000	Rp1.413.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp513.000	Rp860.000	Rp1.615.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp675.000	Rp1.721.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp515.000	Rp1.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp513.000	Rp1.218.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp567.000	Rp1.738.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.415.000
30.	SULAWESI TENGGAH	OP	Rp397.000	Rp552.000	Rp1.335.000
31.	MALIKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.500.000
32.	MALIKU UTARA	OP	Rp535.000	Rp693.000	Rp1.220.000
33.	PAPUA	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000



ii. Rekening Eselon I dan II

NO.	PROVINSI	SATUAN	AGALDAP	PGUDAP	FULLDAPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp418.000	Rp575.000	Rp1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
3.	RIAU	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp867.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.179.000
5.	JAMBI	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.029.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp386.000	Rp496.000	Rp1.054.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp412.000	Rp537.000	Rp1.030.000
9.	DENKELAU	OP	Rp349.000	Rp468.000	Rp1.062.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000	Rp592.000	Rp1.115.000
11.	BANTEN	OP	Rp672.000	Rp832.000	Rp1.504.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000
13.	D.K. JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp979.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp207.000	Rp307.000	Rp1.204.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp308.000	Rp623.000	Rp1.704.000
17.	DAERAH IRI	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.568.000
18.	MUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp463.000	Rp713.000	Rp1.213.000
19.	MUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp373.000	Rp588.000	Rp1.100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.347.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.521.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp343.000	Rp475.000	Rp971.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp298.000	Rp478.000	Rp1.050.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.282.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp152.000	Rp550.000	Rp1.050.000
26.	CORONTALU	OP	Rp352.000	Rp492.000	Rp1.095.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp353.000	Rp504.000	Rp1.101.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.079.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp403.000	Rp582.000	Rp1.216.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp447.000	Rp603.000	Rp1.090.000
31.	SALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.025.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp475.000	Rp623.000	Rp1.050.000
33.	PAPUA	OP	Rp412.000	Rp698.000	Rp1.865.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp453.000	Rp659.000	Rp1.752.000

c. Pejabat Eselon II Ke Bawah

NO	PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	WJ DAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	Rp306.000	Rp376.000	Rp948.000
2	SUMATRA UTARA	OP	Rp279.000	Rp427.000	Rp761.000
3	RIAU	OP	Rp219.000	Rp397.000	Rp717.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000	Rp297.000	Rp607.000
5	JAMBI	OP	Rp254.000	Rp324.000	Rp689.000
6	SUMATRA BARAT	OP	Rp178.000	Rp248.000	Rp663.000
7	SUMATRA SELATAN	OP	Rp290.000	Rp455.000	Rp745.000
8	LAMPUNG	OP	Rp220.000	Rp290.000	Rp768.000
9	BENGKULU	OP	Rp214.000	Rp353.000	Rp512.000
10	BANGKA DAN LINGGAE	OP	Rp207.000	Rp385.000	Rp565.000
11	PANTEN	OP	Rp338.000	Rp425.000	Rp1.351.000
12	JAWA BARAT	OP	Rp414.000	Rp498.000	Rp922.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000	Rp433.000	Rp1.197.000
14	JAWA TENGAH	OP	Rp205.000	Rp275.000	Rp680.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp231.000	Rp318.000	Rp750.000
16	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.352.000
17	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	OP	Rp362.000	Rp441.000	Rp1.419.000
18	JUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp397.000	Rp428.000	Rp920.000
19	JUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp339.000	Rp377.000	Rp825.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000	Rp331.000	Rp714.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp245.000	Rp340.000	Rp1.170.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp250.000	Rp366.000	Rp900.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp234.000	Rp302.000	Rp800.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp208.000	Rp302.000	Rp874.000
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp215.000	Rp285.000	Rp737.000
26	GORONTALO	OP	Rp219.000	Rp289.000	Rp1.299.000
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000	Rp323.000	Rp951.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp258.000	Rp307.000	Rp1.127.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp303.000	Rp385.000	Rp986.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp247.000	Rp295.000	Rp665.000
31	MALUKU	OP	Rp205.000	Rp246.000	Rp633.000
32	MALUKU UTARA	OP	Rp203.000	Rp439.000	Rp903.000
33	PAPUA	OP	Rp221.000	Rp179.000	Rp1.065.000
34	PAPUA BARAT	OP	Rp313.000	Rp421.000	Rp1.120.000

33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI LUAR KOTA/DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp180.000	Rp130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp140.000	Rp100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp150.000	Rp105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp120.000	Rp85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp130.000	Rp95.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp200.000	Rp140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp160.000	Rp115.000

## 24 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN JINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Paratour	Business	First	Published	Business	First
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Abu Dhabi	Orang/Kab	1.150	3.060	3.790	1.140	3.270	3.790
2.	Abuja	Orang/Kab	3.400	5.240	6.410	3.220	6.278	8.410
3.	Addis Ababa	Orang/Kab	2.221	3.080	4.150	1.950	3.350	4.380
4.	Algiers	Orang/Kab	3.490	4.300	6.437	2.610	4.370	6.976
5.	Amman	Orang/Kab	1.840	2.970	4.662	1.860	2.730	4.081
6.	Amsterdam	Orang/Kab	3.060	4.930	6.590	2.730	4.130	7.214
7.	Ankara	Orang/Kab	1.860	2.900	3.800	1.590	2.660	3.700
8.	Antananarivo	Orang/Kab	4.210	5.730	7.250	4.210	5.730	7.820
9.	Astoria	Orang/Kab	3.160	4.960	6.090	3.650	4.212	8.650
10.	Athens	Orang/Kab	3.820	4.830	6.130	2.850	3.160	8.120
11.	Beridir Sri Begawan	Orang/Kab	540	663	969	530	657	957
12.	Bahdad	Orang/Kab	1.703	3.000	4.620	1.579	3.000	3.930
13.	Baku	Orang/Kab	1.949	3.106	4.153	1.538	3.424	4.163
14.	Bangkok	Orang/Kab	560	924	1.220	550	730	1.376
15.	Beijing	Orang/Kab	1.082	2.887	3.672	1.040	3.634	3.160
16.	Beirut	Orang/Kab	1.460	2.590	5.232	1.130	3.100	4.900
17.	Belograd	Orang/Kab	3.005	4.836	7.561	3.598	4.784	8.164
18.	Berlin	Orang/Kab	2.610	3.360	7.300	2.820	3.020	6.330
19.	Bern	Orang/Kab	2.300	4.850	9.451	3.590	4.850	9.450
20.	Bogota	Orang/Kab	5.081	11.523	14.388	6.056	10.690	14.651
21.	Brasilia	Orang/Kab	3.310	7.128	10.934	5.598	10.734	11.347
22.	Brasajava	Orang/Kab	2.018	3.539	5.700	2.075	3.539	5.700
23.	Bruxel	Orang/Kab	3.370	5.346	7.820	3.530	5.316	8.612
24.	Bucharest	Orang/Kab	2.351	4.350	6.890	2.810	3.790	7.290
25.	Budapest	Orang/Kab	1.820	4.340	6.880	2.670	3.500	7.390
26.	Buenos Aires	Orang/Kab	4.000	7.500	10.500	5.500	7.800	12.500
27.	Kairo	Orang/Kab	2.387	3.542	4.941	2.203	2.676	4.530
28.	Canberra	Orang/Kab	2.130	2.514	3.420	1.520	3.035	6.375
29.	Cape Town	Orang/Kab	4.128	4.220	8.349	3.979	4.151	9.691
30.	Caracas	Orang/Kab	4.072	7.624	14.800	4.418	10.182	14.900
31.	Chicago	Orang/Kab	2.461	5.248	6.146	2.236	5.512	6.920
32.	Kolumbo	Orang/Kab	1.050	1.950	3.250	890	1.150	1.910
33.	Dakar	Orang/Kab	1.230	6.540	9.620	3.030	5.860	9.520
34.	Damaskus	Orang/Kab	1.740	3.120	4.120	1.610	3.030	4.120
35.	Dar Es Salaam	Orang/Kab	2.930	4.130	6.540	2.330	3.140	6.420
36.	Darwin	Orang/Kab	1.125	1.703	2.063	971	1.703	3.123
37.	Davao City	Orang/Kab	690	1.430	1.700	660	1.290	1.620
38.	Den Haag	Orang/Kab	3.360	4.930	6.590	2.790	4.130	7.714
39.	Dhaka	Orang/Kab	830	1.213	1.630	770	1.213	1.469
40.	Dili	Orang/Kab	2.420	2.950	3.120	2.320	2.609	3.600
41.	Doha	Orang/Kab	1.460	3.131	4.220	1.490	2.730	3.521
42.	Duha	Orang/Kab	1.470	2.110	5.470	1.460	2.730	5.519
43.	Frankfurt	Orang/Kab	3.340	3.650	7.390	3.350	4.760	6.210
44.	Guangzhou	Orang/Kab	990	1.720	2.600	1.030	1.652	2.390
45.	Hamburg	Orang/Kab	4.108	5.397	7.813	4.952	6.399	9.255
46.	Hanoi	Orang/Kab	680	1.070	1.240	670	950	1.250
47.	Harare	Orang/Kab	3.010	3.700	7.160	2.950	3.780	6.610
48.	Havana	Orang/Kab	3.500	6.560	7.100	3.500	6.550	7.100
49.	Helsinki	Orang/Kab	2.530	4.745	7.180	2.610	3.700	6.100
50.	Ho Chi Minh	Orang/Kab	590	750	1.160	660	840	1.010
51.	Hongkong	Orang/Kab	980	1.410	1.630	890	1.700	2.120
52.	Houston	Orang/Kab	2.010	4.040	8.530	1.970	5.190	8.180
53.	Islamabad	Orang/Kab	1.340	2.380	3.070	1.090	2.310	3.200
54.	Istanbul	Orang/Kab	1.859	2.974	4.114	1.813	3.390	4.150
55.	Jeridsh	Orang/Kab	1.770	2.890	4.160	1.630	2.270	4.160
56.	Jenewa	Orang/Kab	2.187	3.740	7.000	2.170	3.540	7.010
57.	Johor Bahru	Orang/Kab	326	629	1.446	521	640	1.718
58.	Kaboul	Orang/Kab	2.190	2.930	3.325	2.245	2.600	3.165
59.	Karachi	Orang/Kab	1.260	2.470	2.730	1.190	1.920	2.730
60.	Khartoum	Orang/Kab	2.400	3.605	5.260	2.400	2.770	4.090
61.	Kiev	Orang/Kab	2.973	4.490	6.427	2.802	3.206	6.409

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	Business	First	Published	Business	First
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
62.	Kopenhagen	Orang/Kali	2,090	3,035	6,275	1,960	4,599	6,720
63.	Kota Karabali	Orang/Kali	450	084	828	420	681	918
64.	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	566	430	527	686
65.	Kuching	Orang/Kali	520	890	1,500	470	770	1,350
66.	Kuwait	Orang/Kali	1,630	2,240	3,770	1,718	2,130	3,015
67.	Leha	Orang/Kali	1,789	8,735	12,217	4,875	8,003	12,628
68.	Lisabon	Orang/Kali	1,790	2,970	5,711	1,740	3,125	5,941
69.	London	Orang/Kali	3,350	8,189	10,330	2,060	4,770	7,030
70.	Los Angeles	Orang/Kali	1,755	3,825	4,427	1,826	3,875	4,514
71.	Melind	Orang/Kali	2,925	3,614	7,410	2,760	3,814	6,080
72.	Manama	Orang/Kali	1,777	2,208	5,258	1,736	2,105	5,258
73.	Manila	Orang/Kali	670	1,240	1,620	650	1,200	1,380
74.	Magasin	Orang/Kali	3,311	5,764	6,688	3,358	4,972	6,457
75.	Marseille	Orang/Kali	2,100	4,057	7,300	2,690	4,059	7,980
76.	Melbourne	Orang/Kali	1,350	2,300	3,162	1,350	2,611	3,162
77.	Meksiko	Orang/Kali	2,900	5,160	8,538	3,170	6,460	9,458
78.	Moskow	Orang/Kali	2,310	4,890	6,800	2,680	4,900	6,650
79.	Mumbai	Orang/Kali	1,500	3,500	3,500	1,500	2,500	3,500
80.	Muscat	Orang/Kali	1,380	2,450	4,750	2,090	3,110	4,530
81.	Naurchi	Orang/Kali	3,270	4,500	5,492	3,130	4,150	5,500
82.	New Delhi	Orang/Kali	1,500	2,500	3,500	1,500	2,500	3,500
83.	New York	Orang/Kali	2,542	7,195	6,071	2,125	7,270	8,123
84.	Nuomea	Orang/Kali	1,960	3,609	4,612	1,259	3,809	4,612
85.	Osaka	Orang/Kali	1,250	2,040	2,620	1,190	2,149	2,563
86.	Oso	Orang/Kali	3,239	3,518	5,870	3,320	3,618	5,740
87.	Ottawa	Orang/Kali	2,100	3,480	5,570	2,530	4,250	6,449
88.	Panama	Orang/Kali	5,231	9,242	10,307	5,379	10,849	12,394
89.	Paramaribo	Orang/Kali	6,260	7,595	12,540	5,882	7,595	12,260
90.	Peris	Orang/Kali	2,133	3,290	7,412	2,120	4,070	7,412
91.	Perang	Orang/Kali	160	613	734	436	613	734
92.	Perth	Orang/Kali	790	1,100	2,551	970	1,441	2,670
93.	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1,130	1,340	800	1,205	1,460
94.	Port Moresby	Orang/Kali	1,500	2,417	2,927	1,493	2,617	3,040
95.	Praga	Orang/Kali	4,200	6,400	16,997	6,049	12,767	13,602
96.	Prerona	Orang/Kali	2,779	4,220	5,257	2,724	4,151	5,101
97.	Pyeongrang	Orang/Kali	1,560	2,220	4,040	1,500	2,050	4,600
98.	Quito	Orang/Kali	5,064	6,530	13,420	5,040	6,440	14,240
99.	Rabat	Orang/Kali	2,830	3,530	6,280	2,910	3,650	5,690
100.	Riyadh	Orang/Kali	1,580	2,450	2,870	1,500	2,070	2,990
101.	Rome	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
102.	San Francisco	Orang/Kali	1,843	3,565	5,758	1,730	4,291	5,758
103.	Sana'a	Orang/Kali	1,880	3,060	3,910	1,510	2,910	3,840
104.	Santiago	Orang/Kali	4,330	6,900	7,070	3,520	5,050	6,980
105.	Sarajevo	Orang/Kali	3,340	5,900	6,600	3,750	5,700	9,260
106.	Seoul	Orang/Kali	1,390	1,381	1,743	690	1,460	1,650
107.	Shanghai	Orang/Kali	1,196	1,744	2,017	1,010	1,945	2,380
108.	Singapore	Orang/Kali	322	531	647	350	534	647
109.	Sitra	Orang/Kali	1,930	3,340	6,210	1,250	3,450	5,978
110.	Songkhua	Orang/Kali	500	1,610	1,220	590	1,050	1,200
111.	Stockholm	Orang/Kali	2,840	4,405	6,070	2,360	4,405	6,206
112.	Stva	Orang/Kali	2,380	4,710	5,080	2,450	4,500	5,940
113.	Sydney	Orang/Kali	1,840	2,280	2,680	1,420	2,553	2,611
114.	Tashkent	Orang/Kali	3,672	3,530	4,960	3,200	3,561	5,710
115.	Tawar	Orang/Kali	450	690	1,370	420	940	1,480
116.	Tel Aviv	Orang/Kali	1,800	3,300	4,260	1,800	3,600	4,400
117.	Tokyo	Orang/Kali	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118.	Toronto	Orang/Kali	1,770	6,119	7,270	1,940	6,661	7,740
119.	Tripoli	Orang/Kali	2,580	3,230	5,660	2,450	3,870	4,440
120.	Tunis	Orang/Kali	3,098	1,200	4,890	3,098	5,018	5,670
121.	Vancouver	Orang/Kali	1,980	2,420	4,310	1,890	3,800	4,190
122.	Vanua	Orang/Kali	1,904	2,192	5,654	1,924	2,192	2,654
123.	Vatikan	Orang/Kali	2,500	5,000	6,500	2,500	5,000	6,500
124.	Vientiane	Orang/Kali	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
			Published	Business	First	Published	Business	First
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
125.	Warsawa	Orang/Kali	3,409	4,200	4,800	1,110	4,042	4,915
126.	Washington	Orang/Kali	2,436	6,000	9,020	2,110	5,143	7,875
127.	Wellington	Orang/Kali	2,130	4,360	5,770	1,900	5,470	5,990
128.	Wina	Orang/Kali	2,410	3,200	6,550	2,320	3,670	5,920
129.	Wurdhok	Orang/Kali	3,755	6,810	9,085	3,382	6,320	8,774
130.	Yangon	Orang/Kali	750	950	1,100	750	950	1,100
131.	Zagreb	Orang/Kali	1,344	6,750	7,125	4,802	8,821	8,004

35 SATUAN BIAYA OPERASIONAL, KHURUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>AMERIKA UTARA DAN TENGAH</b>			
1.	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	24,000
2.	Ottawa	OT	36,000
3.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	OT	36,000
4.	San Fransisco	OT	24,000
5.	Washington	OT	36,000
6.	Los Angeles	OT	24,000
7.	Chicago	OT	24,000
8.	Houston	OT	24,000
9.	Toronto	OT	24,000
10.	Vancouver	OT	24,000
11.	Meksiko	OT	36,000
<b>AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA</b>			
12.	Buenos Aires	OT	36,000
13.	Paramaribo	OT	36,000
14.	Brasilia	OT	36,000
15.	Caracas	OT	36,000
16.	Havana	OT	36,000
17.	Bogota	OT	36,000
18.	Santiago de Chile	OT	36,000
19.	Lima	OT	36,000
20.	Quito	OT	36,000
21.	Parana	OT	36,000
<b>EROPA TENGAH DAN TIMUR</b>			
22.	Beograd	OT	36,000
23.	Bucharest	OT	36,000
24.	Budapest	OT	36,000
25.	Moskow	OT	36,000
26.	Praha	OT	36,000
27.	Sofia	OT	36,000
28.	Warsawa	OT	36,000
29.	Kiev	OT	36,000
30.	Bratislava	OT	36,000
31.	Zagreb	OT	36,000
32.	Sarajevo	OT	36,000
<b>EROPA BARAT</b>			
33.	Stockholm	OT	36,000
34.	Helsinki	OT	36,000
35.	Roma	OT	36,000
36.	Vatikan	OT	36,000
37.	Frankfurt	OT	24,000
38.	Bern	OT	36,000
39.	Berlin	OT	36,000
40.	Brussel	OT	36,000
41.	Den Haag	OT	36,000
42.	Geneva	OT	36,000
43.	Hamburg	OT	24,000
44.	London	OT	36,000
45.	Paris	OT	36,000
46.	Vienna	OT	36,000

(dalam US\$)

KD.	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Kopenhagen	OT	36.000
18.	Madrid	OT	36.000
49.	Oslo	OT	36.000
50.	Marseille	OT	24.000
51.	Lisabon	OT	36.000
52.	Athens	OT	36.000
53.	Ankara	OT	36.000
54.	Istanbul	OT	24.000
	<b>AFRIKA</b>		
55.	Addis Ababa	OT	36.000
56.	Dar Es Salaam	OT	36.000
57.	Abuja	OT	36.000
58.	Antananarivo	OT	36.000
59.	Dakar	OT	36.000
60.	Nairobi	OT	36.000
61.	Naranc	OT	36.000
62.	Windhoek	OT	36.000
63.	Pretoria	OT	36.000
64.	Cape Town	OT	24.000
65.	Maputo	OT	36.000
	<b>ASIA SELATAN DAN TENGAH</b>		
66.	Mumbai	OT	24.000
67.	Kolombo	OT	36.000
68.	Dhaka	OT	36.000
69.	Islamabad	OT	36.000
70.	Katui	OT	36.000
71.	Karachi	OT	24.000
72.	New Delhi	OT	36.000
73.	Telheran	OT	36.000
74.	Tashkent	OT	36.000
75.	Baku	OT	36.000
76.	Astana	OT	36.000
	<b>ASIA TIMUR DAN PASIFIK</b>		
77.	Hongkong	OT	24.000
78.	Osaka	OT	24.000
79.	Pyung Yang	OT	36.000
80.	Seoul	OT	36.000
81.	Tokyo	OT	36.000
82.	Phnom Penh	OT	36.000
83.	Beijing	OT	36.000
84.	Guangzhou	OT	24.000
85.	Canberra	OT	36.000
86.	Noumea	OT	24.000
87.	Sydney	OT	24.000
88.	Wellington	OT	36.000
89.	Port Moresby	OT	36.000
90.	Darwin	OT	24.000
91.	Melbourne	OT	24.000
92.	Perth	OT	24.000
93.	Perth	OT	24.000
94.	Dilli	OT	36.000
95.	Suva	OT	36.000
96.	Bangkok	OT	36.000
97.	Davao City	OT	24.000
98.	Hanoi	OT	36.000



(dalam US\$)

NO)	PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
131	(2)	13)	31
99.	Kota Kinabalu	OT	24,000
100.	Kuala Lumpur	OT	36,000
101.	Manila	OT	36,000
102.	Penang	OT	24,000
103.	Yangon	OT	36,000
104.	Singapura	OT	36,000
105.	Vientiane	OT	36,000
106.	Rancor Seri Bagawan	OT	36,000
107.	Ho Chi Minh	OT	24,000
108.	Songkhla	OT	24,000
109.	Johor Bahru	OT	24,000
110.	Kuching	OT	24,000
111.	Shanghai	OT	24,000
112.	Tawau	OT	24,000
113.	Jakarta (Perutusan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	36,000
TIMUR TENGAH:			
114.	Khartoum	OT	36,000
115.	Algiers	OT	36,000
116.	Tunisia	OT	36,000
117.	Rabat	OT	36,000
118.	Tripoli	OT	36,000
119.	Baghdad	OT	36,000
120.	Kairo	OT	36,000
121.	Damaskus	OT	36,000
122.	Jeddah	OT	24,000
123.	Sana'a	OT	36,000
124.	Kuwait	OT	36,000
125.	Abu Dhabi	OT	36,000
126.	Amman	OT	36,000
127.	Riyadh	OT	36,000
128.	Beirut	OT	36,000
129.	Doha	OT	36,000
130.	Dubai	OT	24,000
131.	Muscat	OT	36,000
132.	Manama	OT	36,000

36. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp19.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp19.000
3.	RIAU	OH	Rp19.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp19.000
5.	JAMB I	OH	Rp18.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp18.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp18.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000
9.	BENGLULU	OH	Rp18.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000
11.	BANTEN	OH	Rp19.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp19.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp19.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp19.000
17.	BALI	OH	Rp19.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp19.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp19.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp18.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp18.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp19.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp19.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp19.000
26.	GORONTALO	OH	Rp19.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp18.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp19.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp18.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp19.000
31.	MALUKU	OH	Rp20.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000

37. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

37.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	Rp930.000	Rp3.282.000	Rp4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.111.000	Rp2.848.000	Rp3.475.000
3.	RIA U	Per hari	Rp978.000	Rp2.600.000	Rp3.908.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp901.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	Rp1.005.000	Rp1.468.000	Rp3.752.000
6.	SUMATRA BAJAT	Per hari	Rp890.000	Rp2.124.000	Rp3.500.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp846.000	Rp3.191.000	Rp5.952.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp768.000	Rp4.763.000	Rp6.459.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp2.781.000	Rp4.270.000
11.	B A N T E N	Per hari	Rp972.000	Rp2.801.000	Rp4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.563.000	Rp3.519.000
13.	D K I J A R T A	Per hari	Rp1.139.000	Rp1.221.000	Rp3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.270.000	Rp2.662.000	Rp4.217.000
15.	D I Y O G Y A K A R T A	Per hari	Rp905.000	Rp2.207.000	Rp3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp966.000	Rp2.446.000	Rp3.231.000
17.	B A L I	Per hari	Rp925.000	Rp2.056.000	Rp3.536.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.163.000	Rp2.532.000	Rp3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp857.000	Rp2.548.000	Rp3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp868.000	Rp1.261.000	Rp4.289.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp3.716.000	Rp5.694.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp776.000	Rp2.630.000	Rp3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.160.000	Rp2.750.000	Rp4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.166.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.498.000	Rp3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp752.000	Rp2.504.000	Rp3.230.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp830.000	Rp2.164.000	Rp3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp746.000	Rp2.708.000	Rp3.434.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp3.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp839.000	Rp2.609.000	Rp5.150.000
31.	MALIKU	Per hari	Rp947.000	Rp2.872.000	Rp4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.061.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
33.	P A P U A	Per hari	Rp1.167.000	Rp4.082.000	Rp5.348.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.059.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000

37.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

KO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
37.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
37.2.2	PEJABAT ESELON II		
37.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
37.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.680.000
37.2.2.3	RIAU	Per bulan	Rp13.730.000
37.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.5	JAMBI	Per bulan	Rp10.500.000
37.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp10.500.000
37.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
37.2.2.9	BENGLULU	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
37.2.2.11	BANTEN	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.350.000
37.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp13.950.000
37.2.2.15	D.J. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp13.430.000
37.2.2.17	BALI	Per bulan	Rp13.500.000
37.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
37.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
37.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.26	GORONTALU	Per bulan	Rp15.000.000
37.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp13.580.000
37.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
37.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp14.180.000
37.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
37.2.2.33	PAPUA	Per bulan	Rp14.850.000
37.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp14.780.000

37.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per bulan	Rp6.300.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
2.	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.080.000	Rp15.080.000
3.	N I A U	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp15.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
5.	J A M B I	Per bulan	Rp5.850.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
6.	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.150.000	Rp14.850.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp5.550.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
8.	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp5.850.000	Rp14.780.000
9.	BENGKULU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.230.000	Rp6.380.000	Rp15.150.000
11.	B A N T E N	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
12.	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp5.690.000	Rp14.770.000
14.	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.520.000
16.	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp5.850.000	Rp14.630.000
17.	B A L I	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp14.930.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.230.000	Rp15.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.350.000	Rp16.130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.380.000	Rp6.530.000	Rp15.230.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.680.000	Rp15.530.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp6.720.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.200.000	Rp15.230.000
25.	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
26.	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.150.000	Rp5.890.000	Rp15.080.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.980.000	Rp15.680.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.380.000	Rp15.900.000
31.	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.830.000	Rp17.250.000
32.	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp6.830.000	Rp16.880.000
33.	P A P U A	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.200.000	Rp17.630.000
34.	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.130.000	Rp17.330.000

38. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS  
38.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	HESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
38.1.1	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp735.340.000
38.1.2	PEJABAT ESELON II		
38.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.095.000
38.1.2.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp642.137.000
38.1.2.3	R I A U	Unit	Rp567.637.000
38.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp623.862.000
38.1.2.5	J A M B I	Unit	Rp577.546.000
38.1.2.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp599.334.000
38.1.2.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp621.309.000
38.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
38.1.2.9	BENGGULU	Unit	Rp668.689.000
38.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp645.398.000
38.1.2.11	B A N T E N	Unit	Rp593.524.000
38.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp609.463.000
38.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp613.210.000
38.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
38.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp636.290.000
38.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp636.339.000
38.1.2.17	B A L I	Unit	Rp655.480.000
38.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000
38.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp586.493.000
38.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp612.512.000
38.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp658.235.000
38.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp626.038.000
38.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp629.438.000
38.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp654.688.000
38.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000
38.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000
38.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp635.493.000
38.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000
38.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000
38.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
38.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp627.378.000
38.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp685.063.000
38.1.2.33	P A P U A	Unit	Rp677.687.000
38.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000

38.2 Kebutuhan Operasional: Kebutuhan dan/atau Lapangan Roda 4 (Bentuk)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PKR 1 <sup>a</sup>	MONBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp260.345.000	Rp371.797.000	Rp515.306.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp261.525.000	Rp338.922.000	Rp501.507.000
3.	RIAU	Unit	Rp279.499.000	Rp267.181.000	Rp475.248.000
4.	KBPULAUAN RIAU	Unit	Rp265.472.000	Rp341.503.000	Rp357.486.000
5.	JAMBI	Unit	Rp296.683.000	Rp378.918.000	Rp519.810.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp263.344.000	Rp364.581.000	Rp492.538.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp217.629.000	Rp262.703.000	Rp513.335.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp268.620.000	Rp353.410.000	Rp485.001.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp285.024.000	Rp352.281.000	Rp492.687.000
10.	BANJWA HELITUNG	Unit	Rp264.928.000	Rp363.616.000	Rp517.329.000
11.	BANTEN	Unit	Rp252.115.000	Rp359.526.000	Rp490.729.000
12.	LAWA BARAT	Unit	Rp278.580.000	Rp261.071.000	Rp533.909.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp215.826.000	Rp265.799.000	Rp380.913.000
14.	LAWA TENGGAH	Unit	Rp252.059.000	Rp341.806.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp262.462.000	Rp383.624.000	Rp550.586.000
16.	LAWA TIMUR	Unit	Rp238.862.000	Rp342.148.000	Rp491.348.000
17.	BALI	Unit	Rp244.166.000	Rp357.490.000	Rp543.739.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp270.330.000	Rp349.989.000	Rp548.805.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp287.678.000	Rp387.325.000	Rp524.159.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp280.252.000	Rp373.448.000	Rp510.415.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp308.218.000	Rp381.878.000	Rp516.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.117.000	Rp276.200.000	Rp517.339.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp266.225.000	Rp342.900.000	Rp513.762.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp236.500.000	Rp342.900.000	Rp531.401.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp342.229.000	Rp492.610.000
26.	CORONTALU	Unit	Rp271.315.000	Rp387.784.000	Rp511.927.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp439.123.000	Rp382.359.000	Rp484.918.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp278.120.000	Rp380.939.000	Rp485.152.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp230.025.000	Rp371.984.000	Rp494.870.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp277.069.000	Rp378.680.000	Rp499.614.000
31.	MALUKU	Unit	Rp272.475.000	Rp388.652.000	Rp531.953.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp298.593.000	Rp386.390.000	Rp503.930.000
33.	PAPUA	Unit	Rp290.815.000	Rp390.635.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp286.050.000	Rp386.101.000	Rp560.900.000

38.3 Kebutuhan Operasional Bus

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp400.000.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.352.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000

38.4 Kenderaan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit	Rp35.003.000	Rp36.211.000
3.	RIAU	Unit	Rp33.674.000	Rp38.236.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp35.644.000	Rp41.861.000
5.	JAMBI	Unit	Rp36.295.000	Rp39.884.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit	Rp32.438.000	Rp38.087.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp35.328.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp34.389.000	Rp36.330.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp38.794.000	Rp47.115.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp36.573.000	Rp45.539.000
11.	RANTEN	Unit	Rp33.789.000	Rp36.360.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.115.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp40.337.000	Rp45.875.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp38.106.000	Rp42.269.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp37.556.000	Rp44.102.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
17.	BALI	Unit	Rp36.165.000	Rp43.401.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp36.318.000	Rp37.331.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp34.473.000	Rp39.397.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp34.415.000	Rp36.670.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp36.115.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp34.106.000	Rp41.554.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.178.000	Rp36.670.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000	Rp36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000	Rp36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp35.121.000	Rp37.750.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.029.000	Rp35.503.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp34.436.000	Rp39.121.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp34.319.000	Rp40.271.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000	Rp38.184.000
31.	MALUKU	Unit	Rp35.900.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp11.332.000	Rp41.000.000
33.	PAPUA	Unit	Rp40.336.000	Rp47.964.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000



19. SATUAN BAYAR PENGAJARAN PAKSIAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	PAKSIAN DINAS DOKTER	PAKSIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKSIAN SERAMAH MAHASISWA/ TARUNA	PAKSIAN KERJA INGKUMUH /PETUGAS KEMERDEKAAN/ ZEMUBAKTI	PAKSIAN KERJA SATPAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	Satel	Rp1.835.000	Rp213.000	Rp917.000	Rp762.000	Rp1.768.000
2	SUMATERA LINTAS	Satel	Rp1.136.000	Rp840.000	Rp1.012.000	Rp750.000	Rp1.438.000
3	RIZALU	Satel	Rp1.264.000	Rp712.000	Rp704.000	Rp567.000	Rp1.515.000
4	KEPULAUAN RIAU	Satel	Rp1.935.000	Rp798.000	Rp880.000	Rp887.000	Rp1.687.000
5	JAMBI	Satel	Rp1.382.000	Rp978.000	Rp468.000	Rp484.000	Rp1.662.000
6	SUMATERA BARAT	Satel	Rp1.512.000	Rp957.000	Rp717.000	Rp697.000	Rp1.571.000
7	SUMATERA SELATAN	Satel	Rp1.004.000	Rp782.000	Rp804.000	Rp650.000	Rp1.304.000
8	LAMPUNG	Satel	Rp1.173.000	Rp880.000	Rp745.000	Rp670.000	Rp1.671.000
9	BUKITINGGI	Satel	Rp1.566.000	Rp478.000	Rp894.000	Rp698.000	Rp1.640.000
10	BANGKA BELITUNG	Satel	Rp1.574.000	Rp785.000	Rp772.000	Rp647.000	Rp1.934.000
11	KEBANTEN	Satel	Rp1.122.000	Rp673.000	Rp822.000	Rp651.000	Rp1.421.000
12	JAWA BARAT	Satel	Rp881.000	Rp649.000	Rp603.000	Rp503.000	Rp1.119.000
13	DKI JAKARTA	Satel	Rp1.057.000	Rp870.000	Rp690.000	Rp780.000	Rp1.457.000
14	JAWA TENGAH	Satel	Rp1.462.000	Rp864.000	Rp769.000	Rp669.000	Rp1.409.000
15	DI YOGYAKARTA	Satel	Rp1.064.000	Rp627.000	Rp633.000	Rp533.000	Rp1.028.000
16	JAWA TIMUR	Satel	Rp1.143.000	Rp775.000	Rp650.000	Rp553.000	Rp1.414.000
17	BALI	Satel	Rp1.017.000	Rp840.000	Rp713.000	Rp613.000	Rp1.601.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Satel	Rp1.017.000	Rp880.000	Rp701.000	Rp601.000	Rp1.788.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Satel	Rp1.067.000	Rp688.000	Rp787.000	Rp667.000	Rp1.366.000
20	KALIMANTAN BARAT	Satel	Rp1.014.000	Rp922.000	Rp792.000	Rp692.000	Rp1.453.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Satel	Rp1.462.000	Rp737.000	Rp653.000	Rp553.000	Rp1.395.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Satel	Rp1.017.000	Rp787.000	Rp704.000	Rp600.000	Rp1.467.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Satel	Rp1.514.000	Rp978.000	Rp838.000	Rp713.000	Rp2.029.000
24	KALIMANTAN UTARA	Satel	Rp1.754.000	Rp782.000	Rp770.000	Rp672.000	Rp1.746.000
25	SULAWESI UTARA	Satel	Rp1.819.000	Rp719.000	Rp734.000	Rp619.000	Rp1.633.000
26	GORONTALO	Satel	Rp1.180.000	Rp602.000	Rp700.000	Rp600.000	Rp1.381.000
27	SULAWESI BARAT	Satel	Rp1.079.000	Rp882.000	Rp745.000	Rp645.000	Rp1.302.000
28	SULAWESI SELATAN	Satel	Rp1.138.000	Rp884.000	Rp813.000	Rp759.000	Rp1.408.000
29	SULAWESI TENGAH	Satel	Rp1.519.000	Rp671.000	Rp840.000	Rp725.000	Rp1.454.000
30	SULAWESI TENGARA	Satel	Rp880.000	Rp509.000	Rp600.000	Rp500.000	Rp1.200.000
31	MALIKU	Satel	Rp1.480.000	Rp888.000	Rp656.000	Rp556.000	Rp1.416.000
32	MALIKU UTARA	Satel	Rp1.124.000	Rp888.000	Rp778.000	Rp677.000	Rp1.678.000
33	PAPUA	Satel	Rp1.387.000	Rp1.272.000	Rp1.162.000	Rp978.000	Rp1.312.000
34	PAPUA BARAT	Satel	Rp1.525.000	Rp1.192.000	Rp907.000	Rp792.000	Rp1.540.000

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. **Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) selaku penanggung jawab pengelola keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

  - a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
  - b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP. Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium SPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
  - c. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
    - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
      - a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan
      - b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
    - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
    - 3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
      - a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebetum penggabungan;
      - b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK; dan

- c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak sejumlah SPK tahun sebelumnya.
- d. Jumlah kesetoruban alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- e. Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Catatan:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

2. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai.

3. **Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

a. **Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Honorarium Pengguna Anggaran**

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau
- 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Catatan:**

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
2. honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota UKPBJ hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

4. **Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)**  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.

Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

5. **Honorarium Pengelola Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu pencrimaan PNBP fungsional.

Catatan:

Dalam hal Pengelola PNBP telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNBP.

6. **Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

1. Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.
2. Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola SAI.

7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

8. Honorarium Kelebihan Jam Perckayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perckayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perckayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

9. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perckayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perckayasa sebagai pembantu peneliti/perckayasa, koordinator peneliti/perckayasa, sekretariat peneliti/perckayasa,

pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

10. Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Catatan:

1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.

2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada poin 10.1, hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

## 11. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

### 11.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan* sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja penyelenggara.
3. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, narasumber dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
4. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara.

### 11.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group*



*Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.*

Catatan:

1. Moderator berasal dari luar kementerian negara/lembaga penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja penyelenggara.
2. Khusus Kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, moderator dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
3. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara.

#### 11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

#### 11.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (offline).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/

Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panita yang berasal dari Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara langsung (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

## 12. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

### 12.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### 12.2 Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Catatan:

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

13. **Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi**

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi berasal dari PNBK.
- b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 13.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal fakultas tidak memiliki jurusan, maka standar honorarium ketua dan sekretaris program studi dapat menggunakan standar honorarium ketua dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud pada poin 13.1.1.g.
- f. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 13.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 13.3.a sampai dengan 13.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen.

- h. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar pada poin 13.3.p diberikan kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- i. Khusus untuk Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar pada poin 13.3.p.1) dan 13.3.p.2) di atas diperuntukkan bagi penyusunan rancangan mata kuliah baru atau penyempurnaan rancangan mata kuliah lama dengan persentase penyempurnaan substansi paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- j. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial pada poin 13.3.q diberikan kepada penyusun/penulis Garis Besar Program Media (GBPM) Tutorial, Naskah Tutorial melalui Media, dan Kit Tutorial Tatap Muka serta Tutor pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- k. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian pada poin 13.3.r diberikan kepada penyusun/penulis Kisi-Kisi Soal, Soal Objektif dan Uraian Input Bank Soal, dan Soal Ujian Komprehensif (Tugas Akhir Program), serta pelaksana ujian yang terdiri dari Pengawas Tempat Ujian Luar Negeri dan Penguji Tugas Akhir Program Magister pada perguruan tinggi negeri yang hanya menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal (*single mode*).
- l. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- o. Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan negara, yaitu terlib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

14. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya poin 14.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat;
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat;
- c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan
- d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

15. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

16. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*)

maupun daring (online) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. khusus untuk pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Catatan:

1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan:

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas

- jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Klasifikasi II** : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Klasifikasi III** : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja.

- b. Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



18. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selbaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

18.3 Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas tambahan untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah website yang berisi *profile* dan informasi satuan kerja yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga, unit eselon I/setara atau unit vertikal setingkat eselon II di daerah.

19. Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral), *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional*

19.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/ Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (Bilateral/Regional/Multilateral)

Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional, konferensi tingkat menteri, *senior official meeting* (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

19.2 Honorarium Penyelenggara *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional*

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional* dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional*, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Catatan:

Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket *meeting* sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

20. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian /atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

## 21. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional

### 21.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 21.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal

akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

22.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara, dan
- b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.

22.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

22.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*)

maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 22.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### 22.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan:

1. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*).

**23. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI**

**a. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

**b. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI**

Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

Catatan:

Dalam hal kesepakatan terbaru antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu kepada hasil kesepakatan tersebut.

**24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara**

**a. Uang Lembur**

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

**b. Uang Makan Lembur**

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

25. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Catatan:

Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

26. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).

Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Catatan:

Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring (*online*) yang bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

27. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

28. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- c. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).



- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi:
- 1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan
  - 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
- e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
- g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
4. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilempaui mengacu pada ketentuan tersebut.

30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
  - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
  - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

### 32. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Catatan:

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

### 33. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

#### 33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/yang disetarakan; dan
- c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

#### a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

#### b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

#### c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan:

- a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
  - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a. dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
  3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
  4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard* di luar kota, kegiatan *fullboard* di dalam kota, dan kegiatan *fullday/halfday* di luar kota/di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat

dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

34. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Catatan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
2. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

35. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.

36. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui



pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Catatan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat mengacu pada harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

##### a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

##### b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

##### c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:



- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
2. PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
3. Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

**d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna**

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin

prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

- f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Catatan Umum Lampiran I:

1. Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Pelatihan/Kegiatan Sejenis* agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia;
- b. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*); dan
- c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.

3. Untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan oprasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), dan pengadaan pakaian dinas pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Sumatra Utara	Labuhan Batu	143%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Utara
		Selatan		
		Nias Utara	141%	
		Samosir	141%	
		Toba Samosir	132%	
2.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
3.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	146%	dari Satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
		Natuna	133%	
4.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Barat
5.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Timur
6.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	190%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Utara
7.	Maluku	Buru Selatan	164%	dari Satuan biaya Provinsi Maluku
		Kep. Aru	144%	
		Maluku Barat Daya	189%	
		Maluku Tenggara	142%	
		Maluku Tenggara Barat	158%	

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
8.	Papua	Asmat	131%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Dogiyai	138%	
		Inran Jaya	258%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Jayawijaya	147%	
		Lanny Jaya	213%	
		Mamberano Tengah	237%	
		Merauke	148%	
		Nduga	189%	
		Peg. Bintang	228%	
		Puncak	271%	
		Puncak Jaya	244%	
		Sarmi	144%	
		Tolikara	231%	
		Yalimo	230%	
9.	Papua Barat	Fak-Fak	151%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat
		Maybrat	153%	
		Raja Ampat	147%	
		Tambrau	175%	

9/17

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO

NIP 196909221990011001 SM

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 83/PMK.02/2022  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM  
 PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATJAN	BESARAN
<b>ACEH</b>				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp290.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp378.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
<b>SUMATRA UTARA</b>				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dair	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp303.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp300.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
35.	Medan	Kab. Sumsel	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simatupang	Orang/Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp338.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000

NO.	IDUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kab	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kab	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kab	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Dalari	Orang/Kab	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kab	Rp203.000
<b>RIAU</b>				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kab	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kab	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kab	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kampar Singgih	Orang/Kab	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kab	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kab	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kab	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kab	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kab	Rp400.000
<b>KEPULAUAN RIAU</b>				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kab	Rp185.000
<b>JAMBI</b>				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kab	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kab	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kab	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kab	Rp200.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kab	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kab	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kab	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kab	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kab	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kab	Rp308.000
<b>SUMATRA BARAT</b>				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kab	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kab	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kab	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kab	Rp205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kab	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kab	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kab	Rp285.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kab	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kab	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kab	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kab	Rp220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kab	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kab	Rp210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kab	Rp280.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kab	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kab	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kab	Rp210.000
<b>SUMATRA SELATAN</b>				
84.	Palembang	Kab. Banyuwasin	Orang/Kab	Rp203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kab	Rp310.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kab	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kab	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuwasin	Orang/Kab	Rp235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kab	Rp320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kab	Rp225.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kab	Rp205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kab	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kab	Rp248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kab	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kab	Rp245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kab	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kab	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kab	Rp280.000



NO.	DIKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TILUJAN	SATUAN	BESARAN
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	<b>LAMPUNG</b>			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp216.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pasawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pasau Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pangsawa	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp214.000
	<b>BENGLULU</b>			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp332.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp345.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp323.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	<b>BANGKA BELITUNG</b>			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
	<b>HANTEN</b>			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp214.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp317.000
	<b>JAWA BARAT</b>			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp181.000
138	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp260.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp271.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp263.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp206.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KADUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
<b>JAWA TENGAH</b>				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp210.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp210.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp210.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp260.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Kebumaha	Orang/Kali	Rp260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purbalangga	Orang/Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Tegalrenggung	Orang/Kali	Rp240.000
187	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonorejo	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp210.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
<b>DI YOGYAKARTA</b>				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp250.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp250.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp260.000
<b>JAWA TIMUR</b>				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp235.000
199	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegara	Orang/Kali	Rp235.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp235.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209	Surabaya	Kab. Madira	Orang/Kali	Rp245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp235.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegara	Orang/Kali	Rp225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231.	Surabaya	Kota Madani	Orang/Kali	Rp245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
<b>B A I</b>				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
<b>KALIMANTAN BARAT</b>				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayung Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melau	Orang/Kali	Rp430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp330.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp313.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp360.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp125.000

NO.	IDUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
269.	Pangkalraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270.	Pangkalraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271.	Pangkalraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272.	Pangkalraya	Kab. Pulang Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273.	Pangkalraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274.	Pangkalraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
275.	Banjarmasin	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp200.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp274.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Orang/Kali	Rp225.000
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penampang Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
<b>SULAWESI UTARA</b>				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303.	Manado	Kota Kotabobaru	Orang/Kali	Rp250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
<b>GORONTALO</b>				
305.	Gorontalo	Kab. Sula	Orang/Kali	Rp400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308.	Gorontalo	Kab. Puwato	Orang/Kali	Rp650.000
<b>SULAWESI BARAT</b>				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp350.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312.	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
325	Makassar	Kab. Pangrap	Orang/Kali	Rp230.000
326	Makassar	Kab. Sidreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327	Makassar	Kab. Sirewa	Orang/Kali	Rp235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
330	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp172.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343	Palu	Kab. Tojone-Une	Orang/Kali	Rp350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>				
345	Kendari	Kab. Dompu	Orang/Kali	Rp335.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350	Kendari	Kab. Kutawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351	Kendari	Kab. Kutawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
<b>MALUKU UTARA</b>				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
<b>PAPUA</b>				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000
<b>PAPUA BARAT</b>				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000

2. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DIC JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SIKKIDAR (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kab	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kab	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kab	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kab	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp129.000

3/1

K1	URAIAN	SATUAN	RESORAH
01	01	02	03
3.	SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PK)	Orang/Jam	Rp150.000
4.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	Pegawai/Tahun	Rp800.000
4.1.	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	Rp700.000
4.2.	Personil Computer/Network	Unit/Tahun	Rp600.000
4.3.	Plyon	Unit/Tahun	Rp610.000
4.4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp7.100.000
4.5.	Genset lebih kecil dan 50 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
4.6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
4.7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
4.8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp13.250.000
4.9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
4.10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
4.11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp16.740.000
4.12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp17.750.000
4.13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
4.14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp22.950.000
4.15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
4.16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
4.17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000
5.	SATUAN BIAYA PENKEMAHAN DAN PENGETIKAN	Halaman/Judul	Rp250.000
5.1.	Dok. Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya	Halaman/Judul	Rp200.000
5.1.1.	Bahasa Inggris	Halaman/Judul	Rp400.000
5.1.2.	Bahasa Jepang	Halaman/Judul	Rp450.000
5.1.3.	Bahasa Mandarin	Halaman/Judul	Rp360.000
5.1.4.	Bahasa Belanda	Halaman/Judul	Rp420.000
5.1.5.	Bahasa Prancis	Halaman/Judul	Rp420.000
5.1.6.	Bahasa Jerman	Halaman/Judul	Rp300.000
5.1.7.	Bahasa Arab, Lainnya	Halaman/Judul	Rp170.000
5.2.	Dok. Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman/Judul	Rp170.000
6.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM KELUAR/MONGKELAR DALAM NEGERI	Orang	Rp16.000.000
6.1.	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Sistem 1	Orang	Rp17.010.000
6.1.1.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang	Rp1.300.000
6.1.1.1.	Diploma I dan Diploma III	Orang	Rp1.560.000
6.1.1.2.	Diploma IV dan Sistem 1	Orang	Rp1.650.000
6.1.2.	Uang Makan dan Kebutuhan	Orang	Rp1.650.000
6.1.2.1.	Diploma I	Orang	Rp1.650.000
6.1.2.2.	Diploma III dan Sistem 1	Orang	Rp1.650.000
6.2.	Program Sistem 2/SP-1 dan Biaya SP-2	Orang	Rp20.690.000
6.2.1.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang	Rp21.380.000
6.2.1.1.	Sistem 2 dan Spesialis 1	Orang	Rp8.120.000
6.2.1.2.	Sistem 2 dan Spesialis 2	Orang	Rp2.380.000
7.	SATUAN BIAYA BIAYA MESIN FOTOKOP	Unit/Bulan	Rp5.800.000
8.	PENGKUALIFIKAN NASABAH/PEKERJA/MAKHLAK/PROFESSIONAL	Orang	Rp1.700.000
8.1.	Kegiatan Di Dalam Negri	Orang	Rp1.700.000
8.2.	Kegiatan Di Luar Negri	Orang	Rp1.700.000
8.2.1.	Narasumber Kelas A	Orang	Rp1.000
8.2.2.	Narasumber Kelas B	Orang	Rp750
8.2.3.	Narasumber Kelas C	Orang	Rp200

9. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp21.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp20.000
3.	RIAU	OH	Rp21.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp22.000
5.	JAMBI	OH	Rp20.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp20.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp20.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp17.000
9.	BENGGULU	OH	Rp20.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp21.000
11.	BANTEN	OH	Rp21.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp18.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp21.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp20.000
17.	BALI	OH	Rp20.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp23.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp22.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp21.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp21.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp26.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp22.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000
31.	MALUKU	OH	Rp23.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp22.000

4.1 Program Matrik Monev Jarak Capaian Tindakan/Upaya Peningkatan/Perbaikan Fasilitas Layanan Bagi Anggota Pabri/TH, Ditama/Caruban/kebutuhan Katal Bagi Anggota Pabri/TH, Dana Lainnya, Bagi Karyawan Peralasan (Kasual), Anggota Pabri/TH, Anggota yang Tidak Dapat Kembali/Anggota Pabri/TH, Tolak/anggota Pabri/TH dan Ang. Kerasi Bagi Anggota/Anggota Pabri/TH

NO	PROVINSI	SATUAN	GEBRANG PANGKAYAN/UTARA PRA DAERAH/ALTERNATIF/FAKULTAS LAINNYA/UMMA/ANGGOTA KOLABITRI		DANA TARIKAW/ KARDOL/ KADIT/ KAT/ ANGGOTA KALABITRI		HASIL/ LAINNYA/ DARI/ PERUSAHA/ ANGGOTA/ POLUBITRI		ANGGOTA/ VAKU/ SAAT/ BAKI/ KEMUDA/ ANGGOTA/ KALABITRI		TAMBAHAN/ ANGGOTA/ POLUBITRI		JACA/ KAMAL/ BAKI/ KEMUDA/ ANGGOTA/ KALABITRI	
			DA	DE	DA	DE	DA	DE	DA	DE	DA	DE	DA	DE
1	ACEH	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
3	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
4	RIJAUAN RAJA	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
5	JABODI	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
7	SUMATERA KHJARR	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
8	LAMPUNG	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
9	RIJAUAN	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
11	RIJAUAN	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
12	JAWA BARAT	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
13	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
14	JAWA TIMUR	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
15	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
16	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
17	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
18	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
19	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
20	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
21	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
22	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
23	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
24	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
25	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
26	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
27	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
28	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
29	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
30	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
31	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
32	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
33	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130
34	DIY	OH	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130	Rp11.130



9.3 Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PASIEH RUMAH SAKIT	PMKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp27.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp27.000
3.	RIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
4.	KEPULAUAN BIAU	OH	Rp32.000	Rp27.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp27.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp27.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp27.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
9.	BENGLULU	OH	Rp32.000	Rp27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp27.000
11.	BANTEN	OH	Rp30.000	Rp25.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp25.000
17.	RAJ	OH	Rp36.000	Rp32.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp36.000	Rp32.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp36.000	Rp32.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
26.	GORONTALU	OH	Rp36.000	Rp30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp30.000
31.	MALUKU	OH	Rp36.000	Rp32.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp36.000	Rp32.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp37.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp37.000

4.4 Progranam Jaktan Nakanan untuk Sebagai Pasjga Narak Nuar GMS, Petuga Pengemala Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Nrgan, dan Petuga Stuaran Bahu Puntar (SBOP) dan Kesel Tngg Referensia Sencat (ATIS)

NO	PROVINSI	SACJAN	KELLARCA Pns	PETUGAS BNGANATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SBOP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
3.	Riau	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
5.	LAMPUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
9.	BENGKULU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp33.000	Rp32.000
11.	PAPUA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
13.	D.I. JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
17.	BALI	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
18.	DIYAKARANG BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
19.	DIYAKARANG TIMUR	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp32.000	Rp30.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
27.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
30.	SULAWESI TIMUR	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp35.000
31.	MALUKU	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp37.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp37.000
33.	PAPUA	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp43.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp43.000

9.5 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Petugas Dengel dan Tindakan Kapal Kelayaran, Petugas Paluk Gas Ag4 untuk Lampu Sinar, PKS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

NO	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BONGKEL DAN GALANGAN KAPAL RENAVIGASIAN	PETUGAS PALUK GAS AG4 UNTUK LAMPU SINAR	PKS	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
2	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
3	RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
4	KEMULIHAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
5	CAMERU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
6	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
8	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
9	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
10	BANJWA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
11	DIY	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
17	BALI	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
18	BANJWA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
19	BANJWA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
23	KALIMANTAN TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
25	SLAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
26	OGORONTALO	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
27	SLAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
28	SLAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
29	SLAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
30	SLAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
31	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
33	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

No.	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp32.000	Rp45.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
3.	RIAU	OII	Rp32.000	Rp46.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OII	Rp32.000	Rp45.000
5.	JAMBI	OH	Rp32.000	Rp45.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp32.000	Rp45.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp32.500	Rp45.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
9.	BENKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
10.	BANGKA BELITUNG	OII	Rp32.000	Rp48.000
11.	DANTEEN	OH	Rp30.000	Rp44.000
12.	JAWA BARAT	OII	Rp30.000	Rp43.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp42.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp42.000
17.	BALI	OH	Rp38.000	Rp51.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OII	Rp38.000	Rp51.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp54.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OII	Rp36.000	Rp50.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OII	Rp36.000	Rp51.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
26.	GORONTALO	OII	Rp36.000	Rp50.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
29.	SULAWESI TENGAH	OII	Rp36.000	Rp53.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
31.	MALUKU	OII	Rp38.000	Rp51.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp52.000
33.	PAPUA	OH	Rp44.000	Rp60.000
34.	PAPUA BARAT	OII	Rp44.000	Rp61.000

9/4

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp37.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp37.000
3.	RIAU	OII	Rp37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000
5.	JAMBI	OH	Rp37.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp37.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp37.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp37.000
9.	BENGGULU	OH	Rp37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000
11.	BANTEN	OH	Rp34.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000
17.	BALI	OH	Rp42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp42.000
33.	PAPUA	OH	Rp48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000

10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp43.000
2.	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
3.	RIAU	OH	Rp36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp35.000
5.	JAMBI	OH	Rp33.000
6.	SUMATRA BARAT	OH	Rp47.000
7.	SUMATRA SELATAN	OH	Rp49.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp36.000
9.	BENGGULU	OH	Rp39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp36.000
11.	D A N T E N	OH	Rp39.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp45.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp38.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp32.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
17.	BALI	OH	Rp39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp47.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp43.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp38.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp39.000
26.	GORONTALO	OH	Rp41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp45.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp39.000
31.	MALUKU	OH	Rp42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp55.000
33.	PAPUA	OH	Rp55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000

11. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
11.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/DEKON/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp45.000
11.2	RAPAT BIASA			
11.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
11.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
11.2.3	RIAU	Orang/Kali	Rp49.000	Rp17.000
11.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp41.000	Rp25.000
11.2.5	JAMBI	Orang/Kali	Rp49.000	Rp17.000
11.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp18.000
11.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000	Rp18.000
11.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp20.000
11.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
11.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000	Rp18.000
11.2.11	BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000	Rp19.000
11.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp46.000	Rp20.000
11.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp22.000
11.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
11.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp44.000	Rp16.000
11.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp45.000	Rp23.000
11.2.17	BALI	Orang/Kali	Rp48.000	Rp20.000
11.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000	Rp18.000
11.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp21.000
11.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
11.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp16.000
11.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
11.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000	Rp24.000
11.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp21.000
11.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp26.000
11.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
11.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
11.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp34.000
11.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp17.000
11.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp21.000
11.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp22.000
11.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp24.000
11.2.33	PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp31.000
11.2.34	PAPUA DARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp25.000

12. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGARA

NO	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAJ		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAJ	
		SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.630.000
2	SUMATRA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
3	RIAU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
4	KKPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.710.000	OT	Rp1.550.000
5	JAMBI	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
6	SUMATRA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
7	SUMATRA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
8	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.170.000	OT	Rp1.460.000
9	BENKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
10	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
11	BANTEN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
13	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
15	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
14	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
16	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
17	BALEA	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
20	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
24	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
25	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.130.000	OT	Rp1.560.000
26	GORONTALO	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
27	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp57.060.000	OT	Rp1.430.000
28	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.670.000	OT	Rp1.520.000
29	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
30	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
31	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
32	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
33	PAPUA	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
34	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000



13. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
2.	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp1.840.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp2.626.250
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	Rp2.265.000
6.	SUMATRA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
7.	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.778.750
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	Rp2.300.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.181.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	Rp1.852.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp1.869.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.812.500
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.336.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp2.901.250
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.223.000
17.	BALI	Pegawai/Tahun	Rp2.920.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.243.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.315.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.743.750
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp1.971.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.760.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp1.817.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.271.250
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.707.500
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp2.672.500
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.082.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.358.750
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.256.250
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.294.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp2.491.250
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.077.500
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	Rp2.870.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.602.000

14. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

14.1 Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.1.1	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	Rp41.900.000
14.1.2	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp40.000.000
14.1.3	PEJABAT ESELON II		
14.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp39.850.000
14.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp38.430.000
14.1.3.3	RIAU	Unit/Tahun	Rp38.530.000
14.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp38.280.000
14.1.3.5	JAMBI	Unit/Tahun	Rp39.240.000
14.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.190.000
14.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.550.000
14.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp38.670.000
14.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp38.580.000
14.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp38.250.000
14.1.3.11	BANTEN	Unit/Tahun	Rp38.410.000
14.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.330.000
14.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.730.000
14.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.15	D.J. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.610.000
14.1.3.17	BALI	Unit/Tahun	Rp39.950.000
14.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp39.100.000
14.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.980.000
14.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp38.750.000
14.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.990.000
14.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.900.000
14.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp38.560.000
14.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp38.480.000
14.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp38.150.000
14.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp37.180.000
14.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp38.630.000
14.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000
14.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp39.540.000
14.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp39.140.000
14.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp38.230.000
14.1.3.33	PAPUA	Unit/Tahun	Rp38.770.000
14.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp38.640.000

14.2 Kendaraan Dinas Operasional

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	RODA DUA	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp34.620.000	Rp37.640.000	Rp3.930.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp33.470.000	Rp36.070.000	Rp3.700.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp33.560.000	Rp36.210.000	Rp3.670.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp33.750.000	Rp35.930.000	Rp3.570.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp34.130.000	Rp36.970.000	Rp3.810.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.190.000	Rp36.930.000	Rp3.850.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.580.000	Rp36.200.000	Rp3.670.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp36.230.000	Rp3.700.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.250.000	Rp3.680.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp33.330.000	Rp35.860.000	Rp3.610.000
11.	HANTEN	Unit/Tahun	Rp33.410.000	Rp36.090.000	Rp3.580.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp33.350.000	Rp35.990.000	Rp3.560.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000	Rp36.450.000	Rp3.640.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.980.000	Rp38.050.000	Rp3.950.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp34.580.000	Rp37.780.000	Rp3.910.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.600.000	Rp36.280.000	Rp3.650.000
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp35.210.000	Rp38.400.000	Rp4.110.000
18.	KUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.960.000	Rp38.810.000	Rp4.810.000
19.	KUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp33.140.000	Rp35.550.000	Rp3.580.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp34.160.000	Rp36.360.000	Rp3.760.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp35.710.000	Rp38.290.000	Rp4.150.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000	Rp36.620.000	Rp3.800.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp34.010.000	Rp36.130.000	Rp3.700.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp33.660.000	Rp35.680.000	Rp3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp33.930.000	Rp36.060.000	Rp3.710.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp33.670.000	Rp35.690.000	Rp3.670.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp32.470.000	Rp34.690.000	Rp3.360.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp33.630.000	Rp36.320.000	Rp3.640.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp34.450.000	Rp36.660.000	Rp3.840.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp34.680.000	Rp37.210.000	Rp3.940.000
31.	MALELU	Unit/Tahun	Rp34.560.000	Rp36.730.000	Rp3.940.000
32.	MALELU UTARA	Unit/Tahun	Rp33.750.000	Rp35.740.000	Rp3.760.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp34.260.000	Rp36.310.000	Rp4.000.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp34.300.000	Rp36.350.000	Rp3.920.000

14.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan, dan Speed Boat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp2.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	Rp40.760.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000

14.4 Kendaraan Dinas Operasional Patrol Jalan Raya (PJR)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≥ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp78.170.000	Rp19.680.000	Rp47.080.000
2.	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp75.520.000	Rp18.960.000	Rp43.840.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp76.690.000	Rp18.890.000	Rp42.510.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp73.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp77.230.000	Rp19.310.000	Rp44.930.000
6.	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.430.000	Rp46.750.000
7.	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.840.000	Rp42.480.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.900.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.900.000	Rp42.570.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp73.820.000	Rp18.700.000	Rp41.420.000
11.	DANTEH	Unit/Tahun	Rp75.790.000	Rp18.580.000	Rp40.820.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.500.000	Rp40.540.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp76.200.000	Rp18.800.000	Rp42.060.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.910.000	Rp19.750.000	Rp47.550.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp78.490.000	Rp19.610.000	Rp46.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.800.000	Rp42.050.000
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp79.630.000	Rp20.250.000	Rp45.480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp41.900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.210.000	Rp18.600.000	Rp41.760.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp80.890.000	Rp20.370.000	Rp42.090.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.540.000	Rp19.280.000	Rp45.680.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.660.000	Rp18.980.000	Rp43.890.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.210.000	Rp18.720.000	Rp42.070.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.890.000	Rp18.990.000	Rp43.960.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.200.000	Rp18.880.000	Rp43.280.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp36.890.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.770.000	Rp41.870.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.000.000	Rp19.410.000	Rp46.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.520.000	Rp19.710.000	Rp48.200.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.080.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.160.000	Rp43.940.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp77.550.000	Rp19.920.000	Rp48.080.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.840.000	Rp46.680.000

14.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Lini Sewa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Exelon I	Unit/Tahun	Rp30.000.000
2.	Pejabat Exelon II	Unit/Tahun	Rp27.000.000
3.	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp25.000.000

BS

15. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
1.	ACEH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp102.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATRA UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3.	RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5.	JAMBI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6.	SUMATRA HARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7.	SUMATRA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp214.000	Rp135.000	Rp10.000
9.	BANJING	m <sup>2</sup> /tahun	Rp191.000	Rp131.000	Rp10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp215.000	Rp136.000	Rp11.000
11.	BANTEN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12.	JAWA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp10.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp206.000	Rp153.000	Rp11.000
14.	JAWA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp163.000	Rp111.000	Rp10.000
16.	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp190.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	BALI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp200.000	Rp149.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp201.000	Rp148.000	Rp10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25.	SULAWESI UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp187.000	Rp129.000	Rp10.000
26.	GORONTALO	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp138.000	Rp11.000
27.	SULAWESI BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp11.000
28.	SULAWESI SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31.	MALUKU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp221.000	Rp197.000	Rp14.000
32.	MALUKU UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000	Rp166.000	Rp14.000
33.	PAPUA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp11.000
34.	PAPUA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000

16. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp10.831.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp19.458.000
3.	RIAU	Per hari	Rp19.830.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp10.586.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp16.875.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp23.025.000
7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp24.074.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp13.334.000
9.	BENGKULU	Per hari	Rp13.375.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp11.407.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp13.063.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp29.298.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp30.773.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp16.407.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp21.480.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp19.728.000
17.	BALI	Per hari	Rp22.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp17.344.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.058.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp11.949.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp12.852.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.892.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.032.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp11.250.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp13.915.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp20.017.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.579.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp8.735.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp19.350.000

17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp256.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000
5	JAMBANG	Orang/Kali	Rp147.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000
9	BENGGULU	Orang/Kali	Rp109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp90.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp222.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp189.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp166.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000

18. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	JAKARTA	AMBIT	Rp13.255.000	Rp7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	JAKARTA	BENKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.665.000	Rp7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.005.000	Rp3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp1.065.000	Rp2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.821.000	Rp5.192.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.398.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.964.000	Rp2.084.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp0.748.000	Rp5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.142.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.456.000
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.545.000
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp16.709.000	Rp5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.089.000	Rp4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.995.000	Rp5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.886.000	Rp5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.406.000	Rp9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000

84



NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.340.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.500.000	Rp5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.004.000	Rp10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.750.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YUGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.750.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.151.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.114.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.205.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.130.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.350.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.647.000	Rp3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.750.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
95	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
96	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
97	BANDUNG	YUGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
98	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
99	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
101	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
102	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
103	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
104	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
106	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
107	BANJARMASIN	BATAM	Rp2.407.000	Rp1.578.000
108	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.740.000
109	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp2.792.000	Rp1.920.000
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.175.000	Rp9.359.000
111	BANJARMASIN	YUGYAKARTA	Rp7.721.000	Rp4.022.000
112	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
113	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.458.000	Rp4.022.000
115	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.019.000	Rp4.606.000
116	BANJARMASIN	SEKARANG	Rp7.458.000	Rp4.958.000
117	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.458.000	Rp4.097.000
118	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
119	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
120	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
121	BATAM	DENPASAR	Rp5.450.000	Rp4.824.000
122	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
123	BATAM	YUGYAKARTA	Rp7.170.000	Rp3.936.000
124	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
125	BATAM	MANALH	Rp13.413.000	Rp7.482.000
126	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.315.000
127	BATAM	PADANG	Rp5.653.000	Rp4.545.000
128	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.935.000
129	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000

NO	KOTA		SATJAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
131.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
132.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
133.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.350.000
134.	BATAM	TIMIKA	Rp10.119.000	Rp8.621.000
135.	BENGGOLU	PALEMBANG	Rp2.699.000	Rp1.893.000
136.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
137.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
138.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
139.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
140.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
141.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.106.000
142.	BIAK	MANADO	Rp11.731.000	Rp6.353.000
143.	BIAK	MEKKA	Rp18.472.000	Rp9.498.000
144.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
145.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
146.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
147.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.366.000
148.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.091.000
149.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
150.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
151.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.953.000
152.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
153.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
154.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
155.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
156.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
157.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.929.000
158.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
159.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
160.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
161.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
162.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
163.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
164.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.700.000	Rp4.430.000
165.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
166.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
167.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
168.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
169.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
170.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
171.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
172.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
173.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
174.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
175.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.590.000
176.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
177.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
178.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
179.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.872.000	Rp8.717.000
180.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
181.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
182.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
183.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
184.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp5.525.000	Rp3.893.000
185.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
186.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
187.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
188.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
189.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
190.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.894.000
191.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.854.000	Rp7.038.000
192.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
193.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.653.000
194.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
195.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp6.129.000	Rp4.706.000
196.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
197.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
198.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.774.000
199.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
200.	KENDARI	SULO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
201.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
202.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
203.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
204.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.181.000
205.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
206.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.170.000
207.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
208.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
209.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.757.000
210.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
211.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
212.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
213.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
214.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
215.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
216.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
217.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
218.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
219.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
220.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
221.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
222.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
223.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
224.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.107.000
225.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
226.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
227.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
228.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
229.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
230.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
231.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
232.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
233.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
234.	MANADO	SULO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
235.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.202.000
236.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
237.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
238.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp5.246.000
239.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp6.803.000	Rp4.888.000
240.	MATARAM	BATAM	Rp6.401.000	Rp4.803.000
241.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp5.546.000
242.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
243.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
244.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
245.	MATARAM	MANADO	Rp6.717.000	Rp4.735.000
246.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
247.	MATARAM	PADANG	Rp9.660.000	Rp4.867.000
248.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.561.000	Rp4.246.000
249.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
250.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
251.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.331.000
252.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
253.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
254.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
255.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
256.	MEDAN	SULO	Rp9.284.000	Rp4.836.000
257.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
258.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
259.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
260.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
261.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
262.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
263.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.304.000
264.	PADANG	TIMIKA	Rp16.716.000	Rp8.085.000
265.	PALANGKARAYA	PANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp5.022.000
266.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp6.161.000	Rp4.578.000
267.	PALANGKARAYA	YOOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
268.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp6.557.000	Rp4.888.000
269.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
270.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp6.760.000	Rp4.042.000
271.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
272.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
273.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
274.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.085.000
275.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
276.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
277.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
278.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
279.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.705.000
280.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.414.000
281.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
282.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
283.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
284.	PALU	PUJO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
285.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.853.000
286.	PALU	STARABAYA	Rp6.878.000	Rp3.853.000
287.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
288.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
289.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
290.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
291.	PANGKAL PINANG	YOOGYAKARTA	Rp6.045.000	Rp3.262.000
292.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
293.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
294.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.388.000	Rp4.653.000
295.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
296.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
297.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
298.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
299.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
300.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
301.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
302.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
303.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
304.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
305.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
306.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.730.000
307.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
308.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
309.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
310.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
311.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
312.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
313.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
314.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.079.000
315.	SURABAYA	JAYALURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000
316.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
317.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

19. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,539
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	Sao Francisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brasilia	16,393	11,518	5,970
12.	Buenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,048
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
18.	Mexiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	<b>EROPA BARAT</b>			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussel	10,713	5,994	3,870
23.	Marselle	10,550	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,438	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	<b>EROPA UTARA</b>			
33.	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,610	7,203	4,153
37.	Oslø	9,856	4,773	4,049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Roma	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatikan	10,000	6,000	4,500
EROPA TIMUR				
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,952	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moskow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,147
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
AFRIKA BARAT				
54.	Dakar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,845	6,818
AFRIKA TIMUR				
56.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,956	6,081
58.	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,594	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
AFRIKA SELATAN				
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
AFRIKA UTARA				
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,607	3,915
69.	Rabat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tunis	9,419	5,018	3,619
ASIA BARAT				
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,198	3,545
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damaskus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,149	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,156	3,727

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
ASIA TENGAH				
87.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Baku	13,334	8,556	2,281
ASIA TIMUR				
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,666	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94.	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
ASIA SELATAN				
98.	Kabul	6,307	3,905	3,206
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Kinshasa	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,601
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
ASIA TENGGARA				
106.	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Dilli	747	491	350
110.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111.	Ho Chi Minh	1,677	1,303	1,275
112.	Johor Bahru	1,195	911	525
113.	Kina Kinabalu	1,894	1,427	694
114.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115.	Kuching	2,659	1,900	364
116.	Macau	2,453	1,614	1,150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119.	Singapura	991	673	403
120.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121.	Yangon	1,468	1,212	1,053
122.	Tawau	1,894	1,427	694
123.	Songkhla	2,344	1,155	823

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA PASIFIK			
124.	Canberra	6,304	6,304	2,500
125.	Darwin	6,689	4,900	3,964
126.	Melbourne	4,886	3,814	2,856
127.	Noumea	6,940	5,917	1,016
128.	Perth	5,771	1,901	1,525
129.	Port Moresby	17,090	13,835	8,253
130.	Suva	12,668	4,461	2,669
131.	Sydney	4,629	4,237	2,557
132.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133.	Wellington	11,750	9,830	4,130



20. SATUAN BLAYA PENYELENGKARAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI  
 20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

(dalam US\$)

NO.	KOTA	ATK (07)	Langganan: Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Kuat)	Pengamanan Sendiri (03)	Kantong Diplomatik (04)	Jamuan (05)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>AMERIKA UTARA</b>							
1.	Chicago	1.297	38	18	2.574	96	91
2.	Houston	1.220	37	18	2.521	94	89
3.	Los Angeles	1.295	38	18	2.498	96	91
4.	New York (Konsular Jenderal Republik Indonesia)	1.299	41	20	2.308	101	96
5.	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	1.299	40	19	2.308	101	96
6.	Ottawa	1.207	42	20	1.961	106	100
7.	San Francisco	1.369	40	19	2.189	101	96
8.	Toronto	1.307	42	20	2.091	106	100
9.	Vancouver	1.307	42	20	1.553	106	100
10.	Washington	1.334	42	19	2.976	94	93
<b>AMERIKA SELATAN</b>							
11.	Buenos Aires	1.185	38	18	1.150	90	81
12.	Brazilia	1.178	47	22	2.135	165	169
13.	Buenos Aires	1.300	40	18	2.200	150	200
14.	Caracas	1.175	56	27	2.400	142	134
15.	Paramaribo	1.170	33	16	1.150	85	80
16.	Santiago de Chile	1.172	37	18	1.727	95	90
17.	Quito	1.001	22	15	1.150	81	77
18.	Lima	1.099	35	17	1.262	89	85
<b>AMERIKA TENGAH</b>							
19.	Meksiko	1.226	35	17	2.657	90	85
20.	Havana	1.226	35	16	1.691	89	83
21.	Panama	1.038	38	16	2.636	156	74
<b>EROPA BARAT</b>							
22.	Vienna	1.986	264	22	2.776	132	103
23.	Bryssel	1.947	259	22	3.120	129	101
24.	Marseille	2.022	269	23	2.973	134	105
25.	Paris	2.022	269	23	3.076	134	105
26.	Berlin	1.910	254	22	2.799	127	99
27.	Berlin	2.509	334	33	5.068	166	130
28.	Bonn	1.910	254	22	2.690	127	99
29.	Hamburg	1.929	257	22	2.717	128	100
30.	Geneva	2.509	334	28	2.776	166	130
31.	Amsterdam	1.910	254	22	2.690	127	99
32.	Frankfurt	1.910	254	22	2.799	127	99
33.	Den Haag	1.910	254	22	2.690	127	99
<b>EROPA UTARA</b>							
34.	Copenhagen	2.115	281	24	3.341	232	110
35.	Helsinki	1.947	259	22	2.580	213	161
36.	Stockholm	1.910	254	22	3.978	209	90
37.	London	2.707	356	25	3.740	250	250
38.	Oslo	2.340	311	26	3.978	256	121
<b>EROPA SELATAN</b>							
39.	Sarajevo	1.179	145	18	2.232	108	84
40.	Zagreb	1.275	409	20	2.232	117	150
41.	Athina	1.220	156	20	2.775	114	91
42.	Lisaboa	1.220	161	20	2.732	121	93
43.	Madrid	1.270	165	21	2.732	123	95
44.	Rome	1.450	200	45	2.500	150	125
45.	Besgrad	1.269	157	20	1.736	118	90
46.	Vatikan	1.220	177	22	2.478	86	102

NO.	R G T A	ATK (K)	Langganan Koran/ Majalah (Eksempilar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OR)	Kantong Diplomatik (kg)	Jumlah (OR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>EROPA TIMUR</b>							
47.	Berlin	1,220	171	22	1,659	110	50
48.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	56
49.	Kiev	1,393	169	22	1,979	108	55
50.	Moscow	1,111	247	25	2,100	196	110
51.	Praga	1,220	148	19	2,760	95	65
52.	Sofia	1,220	118	19	2,082	95	85
53.	Warsawa	1,445	174	19	3,383	95	85
54.	Wudapest	3,244	292	20	2,271	103	93
<b>AFRIKA BARAT</b>							
55.	Dakar	1,220	148	6	2,341	161	55
56.	Abuja	1,251	148	17	2,295	158	55
<b>AFRIKA TIMUR</b>							
57.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
58.	Nairobi	2,100	132	5	2,694	148	40
59.	Antananarivo	2,029	132	5	1,957	143	35
60.	Das Is Salaam	1,962	128	5	1,630	139	40
61.	Harar	2,095	136	5	1,773	148	35
<b>AFRIKA SELATAN</b>							
62.	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
63.	Cape Town	2,452	162	6	2,530	173	50
64.	Johannesburg	2,256	150	10	2,200	300	46
65.	Napulu	2,305	149	6	1,985	163	47
66.	Pretoria	2,256	150	10	5,000	300	46
<b>AFRIKA UTARA</b>							
67.	Algiers	1,220	140	6	1,615	109	40
68.	Kairo	1,299	157	7	1,658	155	39
69.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
70.	Rabat	1,220	138	6	1,557	137	40
71.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	40
72.	Tunis	1,299	130	6	1,212	170	40
<b>ASIA BARAT</b>							
73.	Mexiko	1,203	423	5	1,278	194	52
74.	Raghdad	1,220	421	5	4,300	194	51
75.	Ammar	1,170	385	5	928	177	47
76.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
77.	Beirut	1,220	399	5	1,579	183	48
78.	Doha	1,120	345	3	1,515	177	47
79.	Darcaskus	1,220	341	5	1,575	175	46
80.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
81.	Aho Thabi	1,170	405	5	1,250	187	49
82.	Saudi's	1,170	373	3	1,464	171	45
83.	Jeddah	1,220	376	3	1,534	173	46
84.	Muscat	1,170	294	6	1,469	181	50
85.	Kayadh	1,220	376	7	1,173	173	46
86.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
87.	Duba	1,170	408	5	1,350	187	49
<b>ASIA TENGAH</b>							
88.	Tashkent	1,220	391	5	2,244	2,244	46
89.	Asana	1,220	412	5	1,150	1,150	46
90.	Baku	1,220	439	5	1,035	1,035	46
<b>ASIA TIMUR</b>							
91.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
92.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
93.	Osaka	1,270	379	6	1,655	51	48
94.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
95.	Pyeongyang	1,220	365	6	1,324	49	47

*Handwritten signature*

(dalam US\$)

NO.	KOTA	ATR (X)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Penggunaan Searbeli (DR)	Keriting Diplomasuk (kg)	Jumlah (OK)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
96.	Beirut	1,270	301	6	2,524	49	49
97.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
98.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
<b>ASIA SELATAN</b>							
99.	Kabul	1,120	50	6	1,915	65	69
100.	Tehran	1,640	62	7	1,850	80	110
101.	Kolombo	1,170	44	5	1,195	57	78
102.	Dhaka	1,170	45	5	1,050	58	79
103.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
104.	Karachi	1,220	45	5	1,546	59	79
105.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	81
106.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
<b>ASIA TENGGARA</b>							
107.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
108.	Bangkok	1,170	47	5	1,430	75	83
109.	Hanoi City	1,170	47	5	962	75	80
110.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
111.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,205	65	81
112.	Jahor Baire	1,170	37	4	971	60	66
113.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
114.	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,363	62	68
115.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
116.	Perang	1,170	37	4	1,170	60	66
117.	Phnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
118.	Singapore	1,170	49	5	2,917	78	87
119.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
120.	Yangon	1,220	45	5	991	74	82
121.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
122.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
123.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
<b>ASIA PASIFIK</b>							
124.	Canberra	1,250	60	6	2,159	123	92
125.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
126.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
127.	Naurua	2,520	50	6	3,243	133	67
128.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
129.	Port Moresby	1,220	50	6	1,012	118	89
130.	Sydney	1,220	52	6	3,169	123	92
131.	Vanuatu	1,220	50	6	642	119	89
132.	Wellington	1,220	52	6	1,843	123	92
133.	Suva	1,134	48	5	1,719	114	86
134.	Dulu	1,138	49	5	1,747	117	88

3/4

20.2 Permodalan, Pemasangan Investasi Lancar, Pakaian Bupa / Sapihan, Bus & Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

NO	K O T A	Permodalan			Pengadaan Investasi Kendaraan (Rp)	Pakaian Bupa/ Sapihan (Rp)	Busa Kendaraan (Rp)			Konsumsi Rapat (Rp)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> /Tahun)	Hollenn (m <sup>2</sup> / Tahun)			Sepeda	Bus	Mobil Bus	
<b>AMERIKA UTARA</b>										
1	Chicago	8.528	87	9	105	327	306	108	112	47
2	Houston	8.351	80	9	681	110	300	400	400	16
3	Los Angeles	8.540	82	9	695	116	308	408	417	17
4	New York	8.498	82	9	733	145	307	409	441	19
5	Ottawa	9.408	72	9	767	161	291	350	401	51
6	San Francisco	9.901	86	10	714	145	315	411	441	50
7	Toronto	9.408	72	9	767	161	291	350	461	51
8	Vancouver	9.408	72	9	767	161	291	350	461	51
9	Washington	9.771	84	11	715	136	315	420	429	48
<b>AMERIKA SELATAN</b>										
10	Bogota	8.528	83	9	695	127	254	350	418	48
11	Brasilia	10.625	89	9	687	717	500	600	600	58
12	Buenos Aires	9.500	80	10	1.500	500	500	600	600	70
13	Caracas	9.426	80	10	775	150	301	406	614	69
14	Lima	9.560	83	9	616	280	250	350	370	41
15	Santiago de Chile	9.441	81	9	688	114	251	350	411	16
16	Quito	7.210	63	9	586	176	281	350	381	30
17	Lima	7.911	63	9	645	163	245	304	347	43
<b>AMERIKA TENGAH</b>										
18	Kobeika	8.901	72	9	682	107	271	342	392	44
19	Managua	7.844	72	9	615	100	275	383	341	41
20	Panama	7.900	72	9	609	187	291	350	306	41
<b>EUROPA BARAT</b>										
21	Amsterdam	13.694	84	9	700	218	303	608	821	51
22	Brussels	13.434	72	9	745	165	295	366	606	50
23	Munich	13.951	80	9	774	112	304	614	837	52
24	Paris	13.451	80	9	714	112	304	614	837	52
25	Berlin	13.175	72	9	731	149	281	386	790	49
26	Bein	24.298	80	10	980	560	471	1.120	1.305	36
27	Bonn	13.176	80	9	731	162	287	385	740	42
28	Hamburg	13.004	72	9	718	169	290	391	794	40
29	Geneva	17.309	70	9	760	590	117	168	1.305	54
30	Amsterdam	13.176	72	9	731	162	287	385	720	42
31	Frankfurt	13.176	72	9	731	162	287	385	740	42
32	Geneva	13.176	72	9	731	162	287	385	790	42
<b>EUROPA UTARA</b>										
33	Kopenhagen	14.507	80	9	810	145	218	612	870	54
34	Helsinki	15.434	72	9	745	600	713	500	805	50
35	Stockholm	13.176	80	9	731	162	287	385	791	42
36	London	13.560	80	9	750	100	300	602	814	51
37	Oslo	16.147	80	9	866	830	332	517	560	60
<b>EUROPA SELATAN</b>										
38	Sarajevo	11.109	72	9	510	112	212	403	667	41
39	Zagreb	17.710	72	9	607	176	262	333	721	71
40	Athens	12.142	72	9	594	130	208	339	420	45
41	Lisbon	12.401	72	9	588	110	214	350	744	46
42	Madrid	12.639	72	9	702	144	276	382	768	47
43	Pina	14.380	80	10	1.300	100	400	750	1.200	75
44	Brussels	12.081	75	9	571	127	286	537	726	45
45	Valencia	13.560	72	9	730	166	295	602	814	50
<b>EUROPA TIMUR</b>										
46	Bratislava	13.176	72	9	731	162	287	385	791	42
47	Bucharest	11.498	72	9	636	112	250	313	600	43
48	Kiev	13.981	72	9	711	159	314	571	729	48
49	Moscow	14.000	72	9	751	180	272	654	843	57
50	Prague	11.387	72	9	631	109	275	505	682	47
51	Sofia	11.387	72	9	631	109	275	505	682	47
52	Warsawa	11.507	72	9	631	109	275	505	682	47
53	Vienna	12.401	72	9	685	117	387	506	744	46
<b>AFRIKA BARAT</b>										
54	Dakar	12.436	72	9	355	104	275	603	151	43
55	Abuja	12.218	72	9	400	200	275	650	150	42
<b>AFRIKA TIMUR</b>										
56	Addis Ababa	11.133	72	9	315	274	275	710	710	6
57	Nairobi	13.756	68	9	315	274	275	663	663	6
58	Antananarivo	11.177	62	9	315	256	350	730	710	6
59	Dar es Salaam	10.757	72	9	304	251	275	680	685	6
60	Harare	11.500	67	9	325	268	250	730	710	6

(dalam US\$)

5/1

NO	K O T A	Perumahan:			Perumahan Inventaris (Kantor IDT)	Pakaian Sapar/ Gajinan (Sof)	Sewa Karyawan (Rp. th)			Kebutuhan Papan (OK)
		Kendaraan dinas (Lulu/ Tahun)	Gedung (m <sup>2</sup> /Tahun)	Halaman (m <sup>2</sup> / Tahun)			Berkas	Misk	Motel Lok	
<b>AFRIKA SELATAN</b>										
61.	Midrand	11.245	76	9	337	275	425	350	844	8
62.	Cape Town	13.457	92	11	508	313	343	350	457	12
63.	Johannesburg	12.380	82	11	300	350	316	257	789	11
64.	Maputo	12.650	79	10	372	245	303	274	806	7
65.	Pretoria	12.380	84	11	506	350	316	257	700	11
<b>AFRIKA UTARA</b>										
66.	Algiers	10.766	72	9	309	252	275	350	153	47
67.	Kairo	12.091	73	10	342	282	278	333	157	57
68.	Khartoum	11.623	72	9	329	271	275	350	151	50
69.	Kasabl	10.666	72	9	301	245	275	350	152	46
70.	Tripoli	10.154	72	9	267	236	275	350	150	43
71.	Tunis	10.118	72	9	260	234	275	400	153	50
<b>ASIA BARAT</b>										
72.	Manama	11.360	74	9	503	404	227	350	154	31
73.	Daghdag	11.500	72	9	360	400	275	300	153	51
74.	Amman	10.527	63	9	430	357	291	300	120	31
75.	Kuwait	9.010	72	9	431	345	275	350	153	29
76.	Riyadh	10.789	72	9	479	360	275	350	150	32
77.	Doha	10.527	63	9	430	357	291	300	120	31
78.	Damaskus	10.309	72	9	430	363	275	350	150	31
79.	Ankara	10.289	72	9	479	360	275	350	150	32
80.	Abu Dhabi	11.132	72	9	464	309	275	350	150	30
81.	Saudi	10.134	63	9	442	354	250	300	123	30
82.	Jeddah	10.277	72	9	447	359	275	350	150	30
83.	Muscat	10.788	72	9	469	376	275	300	150	32
84.	Riyadh	10.277	72	10	447	448	275	334	150	30
85.	Istanbul	10.889	72	9	434	380	275	350	150	32
86.	Duba	11.310	72	9	464	380	275	350	150	33
<b>ASIA TENGAH</b>										
87.	Tashkent	10.309	63	9	453	363	291	300	125	31
88.	Ayran	11.428	64	9	430	493	250	300	120	29
89.	Baku	11.990	63	9	522	414	250	300	125	35
<b>ASIA TIMUR</b>										
90.	Beijing	9.908	72	9	371	397	441	397	394	20
91.	Bangkok	9.908	80	9	371	397	441	400	309	20
92.	Davao	13.862	80	9	407	436	484	435	329	22
93.	Colgo	10.963	80	9	407	436	484	436	314	22
94.	Pyeongang	10.437	72	9	381	414	465	413	320	21
95.	Hanoi	10.331	80	9	397	414	460	414	322	21
96.	Shanghai	9.908	72	9	371	397	441	397	394	20
97.	Guangzhou	9.908	72	9	371	397	441	397	394	20
<b>ASIA SELATAN</b>										
98.	Entab	9.192	63	9	371	397	441	397	394	20
99.	Tehran	11.466	67	12	400	480	710	1.100	2.963	30
100.	Kababab	8.132	63	9	284	322	509	783	2.446	25
101.	Dhaka	8.229	63	9	287	318	513	792	2.475	25
102.	Isranabad	8.229	72	9	287	314	513	792	2.470	25
103.	Karachi	8.229	72	9	287	314	513	792	2.470	25
104.	New Delhi	8.422	63	9	291	327	527	811	2.531	25
105.	Mumbai	8.422	63	9	294	327	527	811	2.534	25
<b>ASIA TENGGARA</b>										
106.	Banjar Sari Bagan	8.617	61	9	301	140	530	529	1.544	26
107.	Kangkok	8.617	61	9	301	140	530	529	1.544	26
108.	Davao City	8.617	61	9	301	140	530	529	1.544	26
109.	Hanoi	8.422	63	9	294	137	527	511	1.534	25
110.	Hin Chi Minh	8.422	63	9	294	137	527	511	1.534	25
111.	Umar Jabr	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
112.	Kuala Lumpur	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
113.	Kuala Lumpur	7.500	63	9	240	112	430	662	2.068	21
114.	Manila	8.617	61	9	301	140	530	529	1.544	26
115.	Penang	7.029	63	9	240	112	430	662	2.068	21
116.	Phnom Penh	7.164	72	9	230	116	440	640	1.555	22
117.	Singapore	6.094	72	9	240	116	440	640	1.555	22
118.	Singapore	6.094	72	9	240	116	440	640	1.555	22
119.	Wellness	6.617	72	9	240	116	440	640	1.555	22
120.	Yongon	6.620	72	9	240	116	440	640	1.555	22
121.	Sungai	6.117	63	9	240	116	440	640	1.555	22
122.	Tawon	7.300	63	9	240	116	440	640	1.555	22

dalam US\$

NO	K O T A	Persebaran			Pengadaan Inventaris hewan (K)	Pakaian Sopir/ Satpam (K)	Bawa Kendaran (Unit)			Keseluruhan Bapak (K)
		Kendaraan dinas (Unit/ tahun)	Cadangan (m <sup>2</sup> /tahun)	Hakmua. (m <sup>2</sup> / tahun)			Sedan	Pua	Mobil Box	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
121.	ASIA PASIFIK									
	Canberra	0,588	72	9	394	200	600	923	2.883	29
124.	Dawun	0,588	72	9	334	158	600	923	2.883	29
125.	Wellington	0,588	72	9	324	158	600	923	2.883	29
126.	Rodonga	10,320	72	9	361	168	643	997	7.116	45
127.	Perth	0,588	72	9	314	148	600	923	2.883	29
128.	Peri Moresby	0,200	72	9	323	149	575	885	2.767	28
129.	Sydney	0,588	72	9	331	150	600	923	2.883	29
130.	Yasima	0,199	72	9	321	149	575	923	2.767	28
131.	Wellington	0,588	72	9	334	158	600	923	2.883	29
132.	Sawa	0,997	72	9	311	135	557	857	2.679	27
133.	Dili	0,102	72	9	318	148	367	376	2.727	27

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Catatan:

Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
3. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak

lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

1. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/atau air) dapat diberikan secara *at cost*.
2. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
4. **Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**  
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal *computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
5. **Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan**  
Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

BA



6. **Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri**  
Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.

7. **Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi**

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi analog dan/atau mesin fotokopi digital, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

8. **Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional**

Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang

dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:

- Narasumber Kelas A : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.
- Narasumber Kelas B : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Anggota Polri/TNI, dan anggota lembaga negara.
- Narasumber Kelas C : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Anggota Polri/TNI.

#### 9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

##### 9.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Catatan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

9.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI

- a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

- b. Dikma/Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.
- c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan anggota.

- d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Anggota Polri/TNI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
  - e. Tahanan adalah Anggota Polri/TNI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
  - f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.
- 9.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah
  - b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
- 9.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Bush Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)
- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas penjaga menara suar yang ikut serta mendampingi petugas penjaga menara suar di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak) petugas penjaga menara suar.
  - b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
  - c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.

- d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patrol/pengawasan.
- e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.

9.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
- b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
- c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
- d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

9.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Catatan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNBK dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

9.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Catatan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/ABK Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

11. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Catatan:

1. Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
2. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.

3. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.
12. **Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri**  
Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.
13. **Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru**  
Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
14. **Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas**  
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.  
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Catatan:  
1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.

Contoh:

*Golf car/sejenisnya* yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.

2. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
  - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

16. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk



pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

17. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatra Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan.

b. Kembali

- 1) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatra Utara); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

20. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

20.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal. kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Catatan:

Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian sopir/satpan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil *box* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil *box* untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum Lampiran II:

1. Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);

- b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
- c. pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Utara	Labuhan Batu	143%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Utara
		Selatan		
		Nias Utara	141%	
		Samosir	141%	
		Toba Samosir	132%	
2.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	184%	dari Satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
3.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	146%	dari Satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
		Natuna	133%	
4.	Kalimantan Barat	Ketapang	150%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Barat
5.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	138%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Timur
6.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	190%	dari Satuan biaya Provinsi Kalimantan Utara

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi
7.	Maluku	Buru Selatan	164%
		Kep. Aru	144%
		Maluku Barat Daya	189%
		Maluku Tenggara	142%
		Maluku Tenggara Barat	158%
		Tual	168%
8.	Papua	Asmat	131%
		Dogiyai	138%
		Intan Jaya	258%
		Jayawijaya	147%
		Lanny Jaya	213%
		Mamberano Tengah	237%
		Merauke	148%
		Nhuga	189%
		Peg. Bintang	228%
		Puncak	271%
		Puncak Jaya	244%
		Sarmi	144%
		Tolikara	231%
		Yalimo	230%
			dari Satuan biaya Provinsi Papua
9.	Papua Barat	Fak-Fak	151%
		Maybrat	153%
		Raja Ampat	147%
		Tambrau	175%
			dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001 <sup>SM</sup>

